LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

TAHUN 2023



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dapat diselesaikan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023 dan perubahannya, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 beserta perubahannya dan merupakan bentuk akuntabilitas yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi merupakan perwujudan bentuk akutabilitas sebagai unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun *outcomes* di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih.

Cimahi, 11 Maret 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI

HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720301 199203 1 012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I **PENDAHULUAN** 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Cascading Kinerja 5
1.5. Isu Strategis 6
1.6. Uraian Singkat Organisasi 8
1.3.1. Struktur Organisasi 8
1.3.2. Sumber Daya Manusia 9
1.7. Anggaran Tahun 2023 11
1.8. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 11
1.9. Sistematika Penulisan 12

BAB II **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA** 15
2.1. Perencanaan 15
2.1.1. Rencana Strategis 15
2.2. Visi dan Misi Kota Cimahi 17
2.2.1. Tujuan dan Sasaran 20
2.2.2. Strategi, Kebijakan dan Program 21
2.3. Indikator Kinerja Utama 23
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 24
2.4.1. Perjanjian Kinerja Eselon II 25
2.4.2. Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV 25
2.5. Program/Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Perjanjian Kinerja Dengan Penjelasan 33
BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA** 36
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 38

3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2023 39
3.1.2. Analisis Perbandingan Realisasi dan Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023..... 46
3.1.3. Analisis Perbandingan Realisasi dan Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah. 49
3.1.4. Analisis Perbandingan Dengan Rata-Rata Kabupaten/Kota. 51
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 53
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 92
7.1.7. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 103
3.1.8. Simpulan hasil analisis indikator kinerja 104
3.2 Realisasi Anggaran 108
BAB IV **PENUTUP** 110
4.1. Kesimpulan..... 110
4.2. Saran dan Rekomendasi 111

LAMPIRAN 113

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Teknis penyusunan LKIP dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKIP ini disusun sebagai media dalam menyampaikan informasi pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi kepada Walikota Cimahi atas pemberian mandat yang diberikan kepada Kepala Dinas, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati pada tahun anggaran 2023 dan sebagai pertanggung-jawaban kepada masyarakat atas penggunaan anggaran publik tahun anggaran 2023 yang digunakan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak secara langsung.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Urusan tersebut merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2013-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi melalui kewenangan dan fungsinya diharapkan mampu mendukung pencapaian misi ke 2 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Misi, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Strategi	Arah Kebijakan
Visi Cimahi Kota Caerdas			
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik			
Meningkatkan tata Kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Meningkatkan pelayanan informasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan pelayanan informasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
		Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi
		Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah

Program prioritas Wali Kota Cimahi yang menjadi target pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi adalah program ke 9 yaitu **"Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik"**.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan Kota Cimahi Tahun 2023.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Cimahi mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan salah satu pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun 2023 tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun 2023. Penyusunan laporan tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Repupublik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
c. Undang-Undang nomo1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
f. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
g. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
h. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
l. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia
m. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207).
p. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dalam proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP adalah sebagai sarana bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah diamanatkan. Secara umum penyusunan LKIP bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi ini menyajikan perencanaan strategis dan pengukuran terhadap palaksanaan dengan berorientasi pada kualtas kinerja sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi.

1.4. Cascading Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya harus dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Cimahi. Untuk mencapai terwujudnya visi Kota Cimahi yaitu “Cimahi Kota Cerdas” dan misi ke-2 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”. Berikut *cascading* kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.

Gambar 1.1 Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi



1.5. Isu Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan yang bersifat konkuren adalah urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten. Untuk urusan-urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Kota Cimahi, maka urusan konkurennya sebagai berikut :

A. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
B. Urusan Bidang Statistik
C. Urusan Bidang Persandian.



Merujuk pada RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2023 sesuai dengan RPJMD Kota Cimahi tahun 2023-2026 adalah Penguatan stabilitas sosial, daya saing Ekonomi dan sumber daya manusia yang didukung dengan penguatan reformasi birokrasi. Isu stretagis diperoleh melalui hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan memperhatikan lingkungan strategis internal dan eksternal yang meliputi:

(1) Isu strategis Kota Cimahi Tahun 2023-2026;

(2) Capaian pembangunan tahun/periode sebelumnya dan permasalahan pembangunan;
(3) Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Tahun 2020;
(4) Isu Strategis Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2020;
(5) Optimalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals*/SDGs); dan
(6) Kondisi Global.

Permasalanan dan Isu strategis pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2023 adalah:

1. Meningkatnya angka kemiskinan;
2. Sumber daya manusia yang kurang berdaya saing;
3. Belum optimalnya kualitas pembangunan ekonomi;
4. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan; dan
5. Belum terpenuhinya standar pelayanan kota.

Dari isu-isu strategis yang dikemukakan tersebut sesuai dengan dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi berperan dalam turut serta memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan dalam isu optimalisasi tata kelola pemerintahan.

Sedangkan isu strategis dan permasalahan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi adalah :

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik.
3. Rendahnya pemahaman keamanan informasi (*security awareness*) oleh seluruh unsur pemerintahan.
4. Rendahnya kualitas data sektoral yang terintegrasi.
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

1.6. Uraian Singkat Organisasi

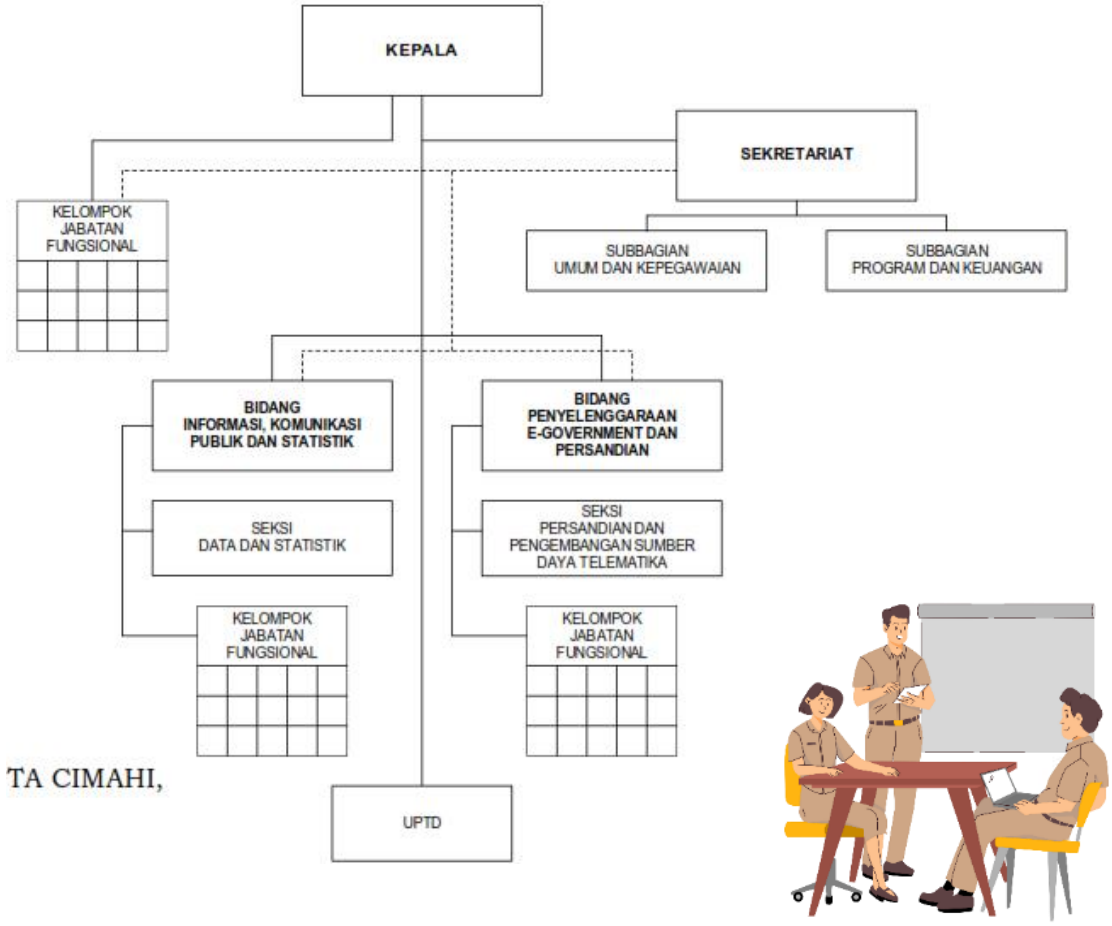
1.6.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi termasuk dalam perangkat daerah tipe C.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri atas:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Subbagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik terdiri atas:
   a. Seksi Data dan Stastistik; dan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian terdiri atas:
   a. Seksi Persandian dan Pengembangan Sumber Daya Telematika; dan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Cimah



1.6.2. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada tahun 2023 Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Cimahi didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 30 orang.

Tabel 1.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informatika, Kota Cimahi, Berdasarkan Jabatan Struktural pada Tahun 2023

No	Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1	Eselon 2A	1	0	1
2	Eselon 3A	0	1	1
3	Eselon 3B	2	0	2
4	Eselon 4A	2	2	4
5	Fungsional Pranata Komputer	3	0	3
6	Fungsional Perencana	1	0	1
7	Pranata Humas	1	0	1

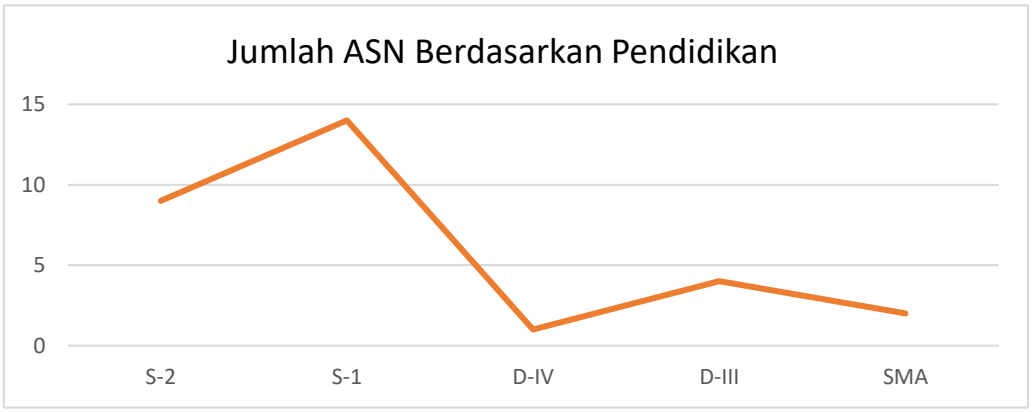
No	Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
8	Staf	8	9	17
	Jumlah	**18**	**12**	**30**

Tabel 1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, berdasarkan Pendidikan pada tahun 2023

No	Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
1	S-2	6	3	9
2	S-1	7	7	14
3	D-IV	0	1	1
4	D-III	3	1	4
5	SMA	2	0	2
	Jumlah	**18**	**12**	**30**

Secara grafis, tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut :

Gambar 1.2 Grafik ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023, Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber daya manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi didukung pula oleh tenaga non ASN, terdiri dari Tenaga Ahli dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai berikut :

Tabel 1.4 Jumlah Tenaga Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023

No	Pendidikan	Tenaga NON ASN		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	S-1	8	4	12
2	D-IV	2	0	2
3	D-III	1	0	1
4	SLTA	2	0	2
	Jumlah	**13**	**4**	**17**



1.7. Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

Tabel 1.5 Rincian Jenis Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Belanja Operasi	12.538.860.090	96,07
Belanja Modal	513.201.505	3,93
Total	**13.052.061.595**	**100**

1.8. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

Berikut tindak lanjut atas rekomendasi berdasarkan Surat Inspektorat Kota Cimahi Nomor 700.02/103/Sekre Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022 tanggal 11 April 2023, sebagai berikut:

Tabel 1.6 Tindak Lanjut atas laporan hasil evaluasi LKIP Tahun 2022

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target
1.	Menyajikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi dan kebijakan yang tergambar dengan adanya aktivitas antar	Menyesuaikan Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menggambarkan adanya aktivitas antar	1 Dokumen

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target
	Bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) pada Dokumen Renstra	Bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*)	
2	Menetapkan target dengan baik dan menginformasikan hambatan serta solusi dalam dokumen rencana aksi	Melengkapi informasi tentang hambatan dan solusi dalam dokumen rencana aksi tahun berikutnya (tahun 2023)	1 dokumen
3	Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait aplikasi pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja yang terintegrasi dengan individu	Melaksanakan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait aplikasi pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja yang terintegrasi dengan individu	1 Dokumen
4	Menyelenggarakan rapat evaluasi monev rencana aksi terkait pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja dan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (*Decision maker*) secara rutin/berkala.	Menyelenggarakan rapat evaluasi monev rencana aksi terkait pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja dan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (*Decision maker*) secara rutin/berkala setiap triwulan	4 Dokumen
5	Laporan kinerja mengacu ke Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 serta menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Menyusun laporan kinerja mengacu ke Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tahun selanjutnya (Tahun 2023)	1 Dokumen

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

2.1.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra adalah rencana jangka menengah yang disusun untuk menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat 1 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun renstra dengan berpedoman pada RPJMD. Proses penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah. Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Tabel di bawah ini menyajikan Sasaran Strategis, indikator kinerja, dan target kinerja Diskominfo Kota Cimahi Tahun 2023-2026 Perubahan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Diskominfo Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA 2023 -2026			
					2023	2024	2025	2026
I	MISI 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik							
1		Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka	3.00	3.20	3.40	3.60
2		Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	%	80	84	88	92
3		Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	level	2.00	3.00	3.00	4.00
4		Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	nilai	351	370	390	400
5		Meningkatnya tata kelola pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	nilai	55,00	55,50	56,00	56,50

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi 2023-2026

2.2. Visi dan Misi Kota Cimahi

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023–2026 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 yaitu:

"CIMAHI KOTA CERDAS"

Dalam Visi RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025: Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari *Creative* yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; *Egalitarian* yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita; *Religious* adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen; *Developable* diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun, *Accretive* diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta *Sustainable* adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi "CIMAHI KOTA CERDAS" adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul, serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005-2025 sebagai berikut:

Misi Satu : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan

Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.

Yakni memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota yang melalui pendidikan membentuk manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi disiplin untuk taat aturan dan bermoral, memelihara kerukunan antar warga kota, dan antar budaya, mengembangkan modal sosial dan mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang menguasai dan memanfaatkan iptek, membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan dalam rangka meraih keunggulan kompetitif sehingga memiliki kebanggaan sebagai warga kota untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Misi Dua : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Yakni meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan yang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik yang lebih demokratis dan konsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu hal mendasar yang menjadi kewajiban adalah pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah sehingga tercapai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi dan penanggulangan korupsi. Cakupan perbaikan tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas sektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sektor swasta untuk memperbaiki tata kelolanya. Upaya mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan publik akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik pula. Hal ini juga penting untuk mencegah kolusi, nepotisme, serta konflik kepentingan yang dapat mengganggu roda perekonomian.

Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah

Persaingan global yang kita hadapi bukan lagi antar bangsa tetapi sudah menohok ke persaingan antar kota, hal ini sejalan dengan penduduk

perkotaan yang semakin banyak serta peran kota sebagai pusat produksi, distribusi dan pemasaran. Daya saing ekonomi kota dibangun oleh penguasaan akan keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan yang unggul dan inovatif memperhatikan keterkaitan antar pelaku dan sumberdaya lokal/daerah sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi sekaligus nilai tambah yang terjadi. Untuk menjangkau keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif harus didukung para pekerja yang dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, dan kemampuan untuk bekerja. Demikian juga usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi andalan ekonomi lokal yang kompetitif yang dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing yang lebih baik.

Misi Empat : Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan

Yaitu dalam mencapai pembangunan kota yang inklusif diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi kota yang lebih tinggi lagi agar dapat mengikutsertakan sebanyak mungkin warga kota yang merasakan manfaat ekonomi yang terjadi. Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi memerlukan intervensi pemerintah kota yang tepat dan afirmatif terhadap kelompok yang terpinggirkan untuk memastikan semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Selain itu mengurangi kesenjangan antar ekonomi lokal dan ekonomi formal serta kesenjangan pelayanan sarana dan prasarana dasar, kualitas manusia dari diskriminasi menurut status, golongan, tingkat pendapatan dan gender.

Misi Lima : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Yaitu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, mengendalikan pencemaran dan kerusakan

lingkungan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan ruang terbuka hijau, konservasi, permukiman dan kegiatan sosial ekonomi. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Lingkungan hidup yang rusak juga diduga menyebabkan munculnya penyakit epidemik maupun endemik. Upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan diarahkan pada: *pertama*, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, yang dicerminkan oleh (1) tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan dan (2) kemampuan pemulihan tanah, air dan udara dalam mendukung kualitas kehidupan secara serasi, seimbang dan lestari; *kedua*, memelihara kekayaan keragaman jenis flora dan fauna dicerminkan oleh : nilai tambah, daya saing kota dan modal pembangunan kota, serta *ketiga*, meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kota.

2.2.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Diskominfo Kota Cimahi. Tujuan Diskominfo Kota Cimahi sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
2. Meningkatkan penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik.
3. Mewujudkan data statistik sektoral daerah yang berkualitas
4. Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran Diskominfo Kota Cimahi merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sasaran Diskominfo Kota Cimahi adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik.
3. Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas
4. Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan



2.2.2. Strategi, Kebijakan serta Program

Strategi merupakan langkah untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan skala prioritas penanganan untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran. Strategi yang disusun Diskominfo Kota Cimahi sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo Kota Cimahi.
2. Meningkatkan jumlah Layanan Publik dan Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.
3. Menigkatkan jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral sebagai bahan penyusunan perencanaan dan melakukan evaluasi pembangunan daerah.
5. Meningkatkan layanan persandian dan keamanan informasi di

lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

6. Meningkatkan kinerja organisasi.

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun, kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelenggaraan pendukung penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
2. Melaksanakan layanan infrastruktur teknologi informasi dan aplikasi yang handal dan sesuai kebutuhan.
3. Melaksanakan layanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien serta melakukan penyebarluasan informasi pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat
4. Melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan data statistik sektoral berbasis teknologi informasi.
5. Mewujudkan tata kelola manajemen persandian dan keamanan informasi yang efektif dalam mendukung terselenggaranya SPBE.
6. Mewujudkan Penyelenggaraan layanan administrasi Pemerintahan.

Strategi, kebijakan yang telah ditetapkan akan dicapai melalui Program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
5. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi mempunyai tugas pokok, kewenangan dan tanggung jawab meliputi 3 (tiga) urusan, yaitu :

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

b. Urusan Persandian,

c. Urusan Statistik

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dituntut mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi seusai dengan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 khususnya terhadap pencapaian msi ke 2 yaitu "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"**

Penyelenggaraan *e-government* melalui teknologi informasi dan komunikasi, Persandian serta pengelolaan data statistik sektoral daerah akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memudahkan implementasi transparansi, mendorong pemerintahan yang baik sekaligus mengurangi risiko korupsi.

IKU pada unit organisasi minimal adalah indikator kinerja output. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaaan Informasi Publik	
3	Terwujudnya Data Stastistik Sektoral Daerah Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	
4	Meningkatnya Keamanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sesuai dengan sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, terdiri dari :

a. Perjanjian Kinerja Eselon II,

b. Perjanjian Kinerja Eselon III,

c. Penjanjian Kinerja Eselon IV dan

d. Perjanjian Kinerja Fungsional yang disetarakan.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 ditetapkan mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Tahun 2023 serta dengan mempertimbangkan nilai anggaran yang dialokasikan. Perjanjian Kerja yang ditetapkan sebagai berikut :

2.4.1. Perjanjian Kinerja Eselon II

IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi merupakan indikator kinerja Kepala Dinas (eselon II) dengan target kinerja, meliputi seluruh urusan kewenangan, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,00
2	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80 Persen
3	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkuallitas	Indeks Pembangunan Statistik	2,00
4	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	55,00

2.4.2. Perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh 2 bidang, yaitu :

i. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik.

Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Urusan Komunikasi dan Informatika pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, sebagai berikut :

a. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan komunikasi publik yang efektif dan efisien	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	60 Persen
	Meningkatnya tata kelola statistik sektoral daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	37 Persen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Meningkatnya kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat	Persentase analisis berita yang berkonten positif	82 persen
2.1	Tersedianya data Statistik Daerah yang berkualitas	Jummlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	250 Data Set

b. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat	Jumlah Layanan Hubungan Media	10 Layanan

c. Analis Berita

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Analis Berita Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya layanan informasi dan pengaduan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen



2	Terlaksananya publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui berbagai media	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen

ii. Bidang Penyelenggaraan e-Government

Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Urusan Komunikasi dan Informatika pada Bidang Penyelenggaraan e-Government, sebagai berikut :

a. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan penyelenggaraan e-Government	Cakupan Pengembangan E-Government Daerah;	2,5 Nilai Indeks

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Terlaksananya penyelenggaraan domain dan sub-domain Pemerintah Kota Cimahi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	90 Persen
1.2	Meningkatnya layanan TIK Pemerintah Kota Cimahi	Persentase aplikasi yang dikelolan dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	85 Persen

b. Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koodinator Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Pengelolaan Infrastruktur Dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

1	Terlaksananya layanan jaringan intra Pemerintah Kota Cimahi	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	75 Unit
2	Terlaksananya penatalaksanaan e-government Pemerintah Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
3	Terlaksananya pengelolaan pusat data Pemerintah Kota Cimahi	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola	1 Unit

c. Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Perubahan Pranat Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengembangan Aplikasi Dan Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	**Sasaran Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	**Target**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	Terlaksananya pengembangan Apliksai dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Dikembangkan	3 Unit
2	Terlaksananya pengembangan sistem yang memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis Elektronik	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan
3	Terlaksananya pengembangan Cimahi Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi Yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen

2. Urusan Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan oleh setingkat eselon IV pada Bidang Penyelenggaraan e-Government Perjanjian Kinerja Urusan Persandian sebagai berikut:

a. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Perubahan Bidang Penyelenggaraan E-Government Dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	33,33 Persen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota Cimahi	Persentase ASN yang menggunakan sertifikat elektronik	3 Persen
1.2	Terselenggaranya pola hubungan komunikasi sandi antar PD Kota Cimahi	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan	10 Persen

b. Kepala Seksi Persandian

Tabel 2.11 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Persandian Dan Pengembangan Sumber Daya Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Kota Cimahi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemeritah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan
2	Terlaksananya layanan keamanan informasi Pemerintah Kota Cimahi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15 Perangkat Daerah
3	Terlaksananya penggunaan komunikasi sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah

3. Urusan Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh setingkat eselon IV pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik. Perjanjian Kinerja Urusan Statistik sebagai berikut:

a. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik

Tabel 2.12 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola statistik sektoral daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	37 Persen;

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Tersedianya data statistik daerah yang berkualitas	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	250 Dataset

b. Kepala Seksi Statistik

Tabel 2.13 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Data Dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya aktivitas pengumpulan data statistik sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	20 Dokumen
2	Meningkatnya kualitas SDM pengelola data/statistik/informasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	45 Orang

4. Sekretariat

Sekretariat sebagai pelaksana layanan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi. Perjanjian kinerja Sekretaris dan eselon IV, sebagai berikut:

a. Sekretaris

Tabel 2.14 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	71 (BB) Nilai Angka
		Indeks Profesionalitas ASN	50 Persen
		Nilai IKM Perangkat Daerah	76,61 Nilai Angka

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Meningkatnya kulitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yanng disusun	100 persen
1.2	Meningkatnya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Milik Daerah	12 Bulan
1.3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urussan pemerintahan daerah	12 Bulan
1.4	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan
1.5	Meningkatnya ketersediaan dan kulitas barang milik daerah penunjang urusan	Jumlah bulan pemelliharaan barang milik daerah	12 Bulan
1.6	Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	100 Persen
1.7	Terlaksananya administrasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun	12 Dokumen

b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tabel 2.15 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubag Program Dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang
2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 Dokumen
3	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkulitas	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerh	2 Dokumen
4	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan lingkup dinas	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 Laporan

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.16 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubag Umum Dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen
2	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket
3	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket
4	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
5	Terfasilitasinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan
6	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 Laporan
7	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	16 Laporan

		Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
8	Tersedianya layanan yang memenuhi kebutuhan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	16 Laporan
9	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit
10	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
11	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit
12	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yanng Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang

2.5 Program/Kegiatan dan Anggaran Yang Mendukung Perjanjian Kinerja dengan Penjelasan

Dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 dilaksanakan melalui Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

- Anggaran Murni : Rp. 12.596.677.640,-
- Angaran Perubahan : Rp. 13.052.061.592,-

Secara ringkas, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 2.17 Pagu Anggaran Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun anggaran 2023

Kode	Uraian	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Pagu Anggaran Perubahan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**13.052.061.595**
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**12.392.469.095**
2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.035.105.843**
2	**16**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**43.549.700**
2	16	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.725.700
2	16	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.824.000
2	**16**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.106.064.353**
2	16	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.090.081.053
2	16	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.983.300
2	**16**	**1**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**16.085.000**
2	16	1	2,03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.085.000
2	**16**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**88.047.000**
2	16	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	88.047.000
2	**16**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**393.403.900**
2	16	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.569.400
2	16	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.901.000
2	16	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.984.500
2	16	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.949.000
2	**16**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**84.975.000**
2	16	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.540.000
2	16	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.000
2	16	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.435.000
2	**16**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**302.980.890**
2	16	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.090.000
2	16	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	166.060.890
2	16	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.830.000
2	**16**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**2.278.917.450**
2	**16**	**2**	**2,01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**2.278.917.450**
2	16	2	2,01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	184.662.500
2	16	2	2,01	6	Pelayanan Informasi Publik	136.900.000

2	16	2	2,01	7	Layanan Hubungan Media	1.957.354.950
2	**16**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**3.078.445.802**
2	**16**	**3**	**2,01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.768.773.511**
2	16	3	2,01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.768.773.511
2	**16**	**3**	**2,02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.309.672.291**
2	16	3	2,02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	256.976.650
2	16	3	2,02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	431.528.437
2	16	3	2,02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	433.182.204
2	16	3	2,02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	61.573.000
2	16	3	2,02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	126.412.000
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**253.312.500**
2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**253.312.500**
2	**20**	**2**	**2,01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**253.312.500**
2	20	2	2,01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	226.124.000
2	20	2	2,01	2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	27.188.500
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**406.280.000**
2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**406.280.000**
2	**21**	**2**	**2,01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**333.760.000**
2	21	2	2,01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	103.500.000
2	21	2	2,01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	230.260.000
2	**21**	**2**	**2,02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**72.520.000**
2	21	2	2,02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72.520.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 disajikan dari aspek keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu organisasi. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana organisasi memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Perjanjian kinerja yang telah dilakukan merupakan target yang diharapkan dapat dicapai pada akhir masa anggaran tahun berjalan.

Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 dilakukan terhadap target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023. Dan selanjutnya dilakukan perbandingan dengan target kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2022, serta target akhir tahun Rencana Startegis (Renstra) untuk melihat kecenderungannya dan kemungkinan ketercapainyya pada masa akhir Renstra.

Pengukuran kinerja dilakuan dalam rangka memastikan adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator sasaran. Pengukuran kinerja

yang disajikan dalam LKIP dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2023, yaitu:

a. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan/atau relatif (%).
b. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator jumlah kegiatan, jumlah orang, jumlah laporan dan jumlah barang atau jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya.

Formula pengukuran/penghitungan realisasi indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Formula pengukuran/penghitungan realisasi indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Capaian Nilai Indeks SPBE hasil dari Penilaian/Evaluasi
2	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Capaian Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik hasil dari Penilaian/Evaluasi
3	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	Capaian Nilai Indeks Pembangunan Statistik hasil dari Penilaian/Evaluasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula
(1)	(3)	(4)	(5)
4	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Capaian Nilai Indeks KAMI hasil dari Penilaian/Evaluasi
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Karakteristik indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menggambarkan pencapaian yang semakin baik dengan rumusan:

Gambar 3.1 Rumus pencapaian Dinas Komunikasi dan Informatika yang semakin baik

$$Persentase\ pencapaian\ rencana\ tingkat\ capaian = \frac{Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

Penilaian kinerja meliputi kinerj unit kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Untuk skala penilian kinerja dan interpretasi adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja >= 80% sampai dengan 100% = Sangat baik.
2. Capaian kinerja > 60% sampai dengan 79,9% = Baik
3. Capaian kinerja > 50% sampai dengan 59,9 % = Sedang
4. Capaian kinerja kurang dari 49,9% = Kurang

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan kolaborasi antara sumber-sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh organisasi. Sumberdaya organisasi antara lain sumber daya manusia atau personil organisasi mencakup kemampuan/kualitas intelektual dan berorganisasi dan kuantitasnya, kualitas dan kuantitas peralatan dan perlengkapan kerja, nilai anggaran yang dikelola, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta kebijakan-kebijakan yang mengatur dan

berpengaruh baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam seluruh skala; struktur dan sistem manajemen dan operasi baik yang tertulis maupun tidak tertulis; hubungan-hubungan organisasi formal dan informal baik dalam lingkup Pemerintah Kota Cimahi, instansi vertikal pemerintahan maupun dengan lembaga non pemerintahan; hubungan-hubungan dengan masyarakat, baik dalam skala individual maupun kelompok.

3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi pada tahun 2023, sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2023-2026 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Sedangkan dokumen Perjanjian Kinerja Diskominfo Kota Cimahi Tahun 2023 menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja yang akan dicapai. Realisasi pada akhir tahun 2023 menunjukan bahwa keseluruhan sasaran dapat dicapai dengan sangat baik. Rata-rata capaian indikator dan evaluasi kinerja rata-rata sebesar 126,65% hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Diskominfo sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis/IKU Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realaisasi	Capaian (%)	Interpretasi
1	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	4,02	134,00%	Sangat Baik
2	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80%	90,48	113,10%	Sangat Baik
3	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	2,00	2,53	126,50%	Sangat Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realaisasi	Capaian (%)	Interpretasi
4	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351	409	116,52%	Sangat Baik
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	55,00	78,71	143,11%	Sangat Baik

Sasaran I
Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Untuk mengukur sasaran strategi ”Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” menggunakan indikator Evalusi SPBE. Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi. Indeks SPBE pada tahun 2023 ditergetkan ditargetkan sebesar 3,00. Berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi capaian SPBE Kota Cimahi sebesar 4,02 dengan predikat sangat baik, sehingga tingkat capaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2023 sudah melebihi harapan/target yaitu sebesar 134% (sangat baik).

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2023 Sasaran I Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

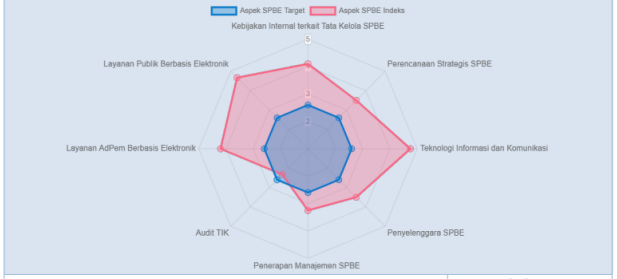
	2023	2024	2025	2026
Target	3.00	3.20	3.40	3.60
Realisasi	4,02			
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	**134,00%**			

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi SPBE Kota Cimahi Tahun 2023, raihan dan kurva indeks SPBE Pemerintah Kota Cimahi adalah seperti yang ditunjukan pada Gambar sebagai berikut :

Gambar 3.2 Indeks SPBE Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KOTA CIMAHI **4,02** (Sangat Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	**4,02**
Domain Kebijakan SPBE	4,10
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*4,10*
Domain Tata Kelola SPBE	4,00
Perencanaan Strategis SPBE	*3,50*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*4,75*
Penyelenggara SPBE	*3,50*
Domain Manajemen SPBE	3,00
Penerapan Manajemen SPBE	*3,25*
Audit TIK	*2,33*
Domain Layanan SPBE	4,38
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*4,20*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*4,67*

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Sasaran II
Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik

Pengukuran sasaran "Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik" dilihat melalui capaian indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik merujuk pada ketentuan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.

Keterbukaan informasi publik pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 80, berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan peringkat penerapan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023 sebesar 90,48 dengan kualifikasi Informatif. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik mencapai 113,10% sehingga capaian kinerja Indeks keterbukaan Infromasi Publik tercapai melebihi harapan dengan predikat sangat baik.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tahun 2023 Sasaran II Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik dengan Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik

	2023	2024	2025	2026
Target	80	84	88	92
Realisasi	90,48			

Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	**113,10%**			

Sasaran III

Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas

Sasaran "Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas" Indeks Pembangunan Statistik diukur melalui evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara rinci penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

a. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektroal pada instansi pusat dan pemerinth daerah;
b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah; dan
c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintah daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral.

Target IPS pada tahun 2023 sebesar 2,00 dan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statisik Sektoral (EPSS) Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik sebesar 2,53 dengan kategori Cukup sehingga capaian indikator sebesar 126,50% (sangat baik) melebihi harapan.

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tahun 2023 Sasaran III Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas dengan Indikator Indeks Pembangunan Statistik

	2023	2024	2025	2026
Target	2	3	3	4
Realisasi	2,53			
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	**126,50%**			

Sasaran IV

Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah.

Sasaran meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah dikukur menggunakan indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Indeks (KAMI) merupakan alat untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi. Evaluasi dilakukan terhadap sebagai berbagai area yang menjadi target penerapan kemanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memnuhi semua aspek kemanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

Pada Tahun 2023 Indeks KAMI yang ditargetkan adalah 351 dan hasil penilaian yang telah dilakukan sebesar 409 dengan demikian capaian sasaran meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah tercapai melampaui target sebesar 116,52% (sangat baik).

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2023 Sasaran IV Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

	2023	2024	2025	2026
Target	351	370	390	400
Realisasi	409			
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	**116,52%**			

Sasaran V

Meningkatnya tata kelola pemerintahan

Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah diukur menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan mengadaptasi indikator Reformasi General. Penilaian dilakukan secara mandiri dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan di evaluai oleh *Leading Institution* dan reviu Inspektorat.

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja pembangunan.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Penilaian Indeks RB Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 sampai dengan penyusunan LKIP ini belum diperoleh hasil oleh karena itu pengukuran kinerja menggunakan hasil tahun 2022 sebesar 78,71, maka capaian kinerja tercapai melebihi harapan dengan capaian sebesar 143,11% (sangat baik).

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Tahun 2023 Sasaran V Meningkatnya tata kelola pemerintahan dengan Indikator Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

	2023	2024	2025	2026
Target	55,00	55,50	56,00	56,50
Realisasi	78,71			
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	**143,11%**			

3.1.2. Analisis Perbandingan Realisasi dan Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Berikut disampaikan perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023 dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi dan Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 Indeks SPBE

	2022	2023
Target	3.19	3.00
Realisasi	3,09	4,02
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	**97%**	**134%**
Peningkatan/Penurunan realisasi dari tahun lalu		**0,93**
Peningkatan/penurunan capaian kinerja dari tahun lalu		**37%**

Pencapaian indeks SPBE menggambarkan kualitas layanan publik maupun layanan administrasi yang diselenggarakan secara elektronik di Pemerintah Kota Cimahi. Indeks SPBE Kota Cimahi pada tahun 2022 sangat baik yaitu sebesar 4,02 meningkat sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya, peningkatan yang diperoleh sebesar 0,93 poin.

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik Tahun 2023 dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi dan Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 Indeks Keterbukaan Informasi Publik

	2022	2023
Target		80
Realisasi	73	90,48
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan		**113,10%**
Peningkatan/Penurunan realisasi dari tahun lalu		**17,48**
Peningkatan/penurunan capaian kinerja dari tahun lalu		

Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik menilai kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan di Pemerintah Kota Cimahi. Capaian Indeks keterbukaan infromasi publik pada tahun 2023 meningkat 17,48 poin dari nilai 73 dengan predikat cukup informatif menjadi 90,48 dengan predikat Informatif.

Berikut disampaikan perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas Tahun 2023 dengan Tahun 2022:

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi dan Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 Indeks Pembangunan Statistik

	2022	2023
Target	N/A	2,00
Realisasi	N/A	2,53
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan		**126,50%**
Peningkatan/Penurunan realisasi dari tahun lalu		
Peningkatan/penurunan capaian kinerja dari tahun lalu		

Pengukuran penyelenggaraan statistik sektoral dengan Indeks pembangunan statistik baru diselenggarakan pada tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik sehingga kinerja pada tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah Tahun 2023 dengan Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi dan Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 Indeks Keamanan Informasi.

	2022	2023
Target	N/A	351
Realisasi	386	409
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan		**116,52%**
Peningkatan/Penurunan realisasi dari tahun lalu		**23**
Peningkatan/penurunan capaian kinerja dari tahun lalu		

Kualitas tingkat kesiapan pengamanan informasi Kota Cimahi dapat dilihat melalui capaian Indeks KAMI, pada tahun 2023 capaian Indeks Kami sebser 409 meningkat sebesar 23 poin dibandingkan tahun lalu. Untuk peningkatan/penurunan capaian kinerja Indeks KAMI tidak dapat dibandingkan karena pada tahun sebelumnya Indeks KAMI tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk mengukur sasaran meningkatnya keamanan system informasi pemerintah daerah.

Berikut disampaikan perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan Tahun 2023 dengan Tahun 2022:

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dan Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi.

	2022	2023
Target	N/A	55,00
Realisasi	78,71	78,71
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan		**143,11%**
Peningkatan/Penurunan realisasi dari tahun lalu		**N/A**
Peningkatan/penurunan capaian kinerja dari tahun lalu		**N/A**

Hasil capaian evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 sampai dengan laporan ini selesai disusun masih belum didapat sehingga masih menggunakan data capaian tahun 2023 sehingga analisis perbandingan belum dapat dilakukan.

3.1.3. Analisis Perbandingan Realisasi dan Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah.

Perbandingan realisasi kinerja Indeks SPBE Tahun 2023 dengan target akhir Renstra 2023-2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.13 Capaian kinerja Tahun 2023 Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dibandingkan dengan target akhir jangka menengah

	2023	2024	2025	2026
Target	3.00	3.20	3.40	3.60
Realisasi	4,02			
Capaian kinerja tahun dilaporkan	**134,00%**			
Realisasi kinerja tahun ini terhadap terget akhir renstra	**111,67%**			

Berdasarkan tebel di atas menunjukan perbandingan capaian kinerja Indek SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 melebihi target akhir renstra. Target akhir Renstra sebesar 3,60 sehingga realisasi kinerja tahun ini terhadap target akhir renstra sebesar 111,67%.

Perbandingan realisasi capaian kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun berjalan dibandingkan dengan target akhir Renstra sebagai berikut:

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Tahun 2023 Indeks Keterbukaan Informasi Publik dibandingkan dengan target akhir jangka menengah.

	2023	2024	2025	2026
Target	80	84	88	92
Realisasi	90,48			
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	**113,10%**			
Realisasi kinerja tahun ini terhadap terget akhir renstra	**98,35%**			

Dari tabel yang disajikan capaian kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 sebesar 90,48%, realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target akhir renstra sebesar 98,35%, capaian ini hampir

mendekati target akhir renstra dengan selisih 1,65% untuk mencapai target akhir renstra.

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pembangunan Sttatistik Tahun 2023 dengan target akhir Renstra 2023-2026 disajikan dalam tabel di bawah:

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Tahun 2023 Indikator Indeks Pembangunan Statistik dibandingkan dengan target akhir jangka menengah

	2023	2024	2025	2026
Target	2	3	3	4
Realisasi	2,53			
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	**126,50%**			
Realisasi kinerja tahun ini terhadap terget akhir renstra	**63,25%**			

Sesuai dengan data capaian realisasi kinerja Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2023 sebesar 2,53, dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2026 realisasi kinerja tahun 2023 adalah sebesar 63,25%. Untuk mencapai target akhir renstra sebesar 4 di tahun 2026 masih realistis untuk dapat dicapai mengingat masih tersedia waktu 3 tahun untuk mencapai terget tersebut.

Perbandingan realisasi capaian kinerja Indeks KAMI tahun berjalan dibandingkan dengan target akhir Renstra sebagai berikut:

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Tahun 2023 Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dibandingkan dengan target akhir jangka menengah

	2023	2024	2025	2026
Target	351	370	390	400
Realisasi	409			
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	**116,52%**			
Realisasi kinerja tahun ini terhadap terget akhir renstra	**100,02%**			

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas capaian kinerja Indeks KAMI Tahun 2023 sudah melampaui target akhir Renstra. Realisasi kinerja tahun ini terhadap target renstra sebesar 100,02%.

Perbandingan realisasi capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebagai berikut:

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Tahun 2023 Indikator Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dibandingkan dengan target akhir jangka menengah

	2023	2024	2025	2026
Target	55,00	55,50	56,00	56,50
Realisasi	78,71			
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	**143,11%**			
Realisasi kinerja tahun ini terhadap terget akhir renstra	**139,31%**			

Hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sampai saat laporan ini selesai disusun belum didapatkan, dalam tabel di atas disajikan sementara data tahun 2022, dengan capaian tersebut realisasi kinerja terhadap target akhir renstra sebesar 139,31%.

3.1.4. Analisis Perbandingan Dengan Rata-Rata Kabupaten/Kota.

Capaian Kinerja rata-rata sasaran Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di atas rata-rata realisasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebesar 0,61 poin. Rata-rata realisasi Indeks SPBE Kabupaten/Kota sebesar 3,41, dengan capaian ini peringkat Kota Cimahi berada pada urutan ke 4 tertinggi di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Tahun 2023 Indikator Indeks SPBE dibandingkan dengan tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Barat

	2023	Rata-rata realisasi Kab/Kota	Perbandingan dengan Rata-rata Kab/Kota	Peringkat Kab/Kota
Target	3.00			
Realisasi	4,02	3,41	0,61	4
Capaian kinerja tahun dilaporkan	**134,00%**			

Capaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota se

Provinsi Jawa Barat sebesar 4,77 di atas capaian rata-rata Kabupaten/Kota, capaian kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kota Cimahi Tahun 2023 berada di posisi ke 17 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Tahun 2023 Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik dibandingkan dengan tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Barat

	2023	Rata-rata realisasi Kab/Kota	Perbandingan dengan Rata-rata Kab/Kota	Peringkat Kab/Kota
Target	80			
Realisasi	90,48	85,71	4,77	17
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	**113,10%**			

Sasaran terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik capaian di tahun 2023 berada 0,07 poin di bawah rata-rata capaian kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat berada di urutan ke 18.

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Tahun 2023 Indikator Indeks Pembangunan Statistik dibandingkan dengan tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Barat

	2023	Rata-rata realisasi Kab/Kota	Perbandingan dengan Rata-rata Kab/Kota	Peringkat Kab/Kota
Target	2			
Realisasi	2,53	2,60	-0,07	18
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	**126,50%**			

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Tahun 2023 Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika dibandingkan dengan tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Barat

	2023	Rata-rata realisasi PD lain	Perbandingan dengan Rata-rata PD lain	Peringkat antar PD
Target	55,00			
Realisasi	78,71			
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	**143,11%**			

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Pada Tahun Anggaran 2023 kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, dari hasil evaluasi yang diperoleh rata-rata pencapaian IKU sebesar 126,65%. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi pada tahun 2023, yaitu:

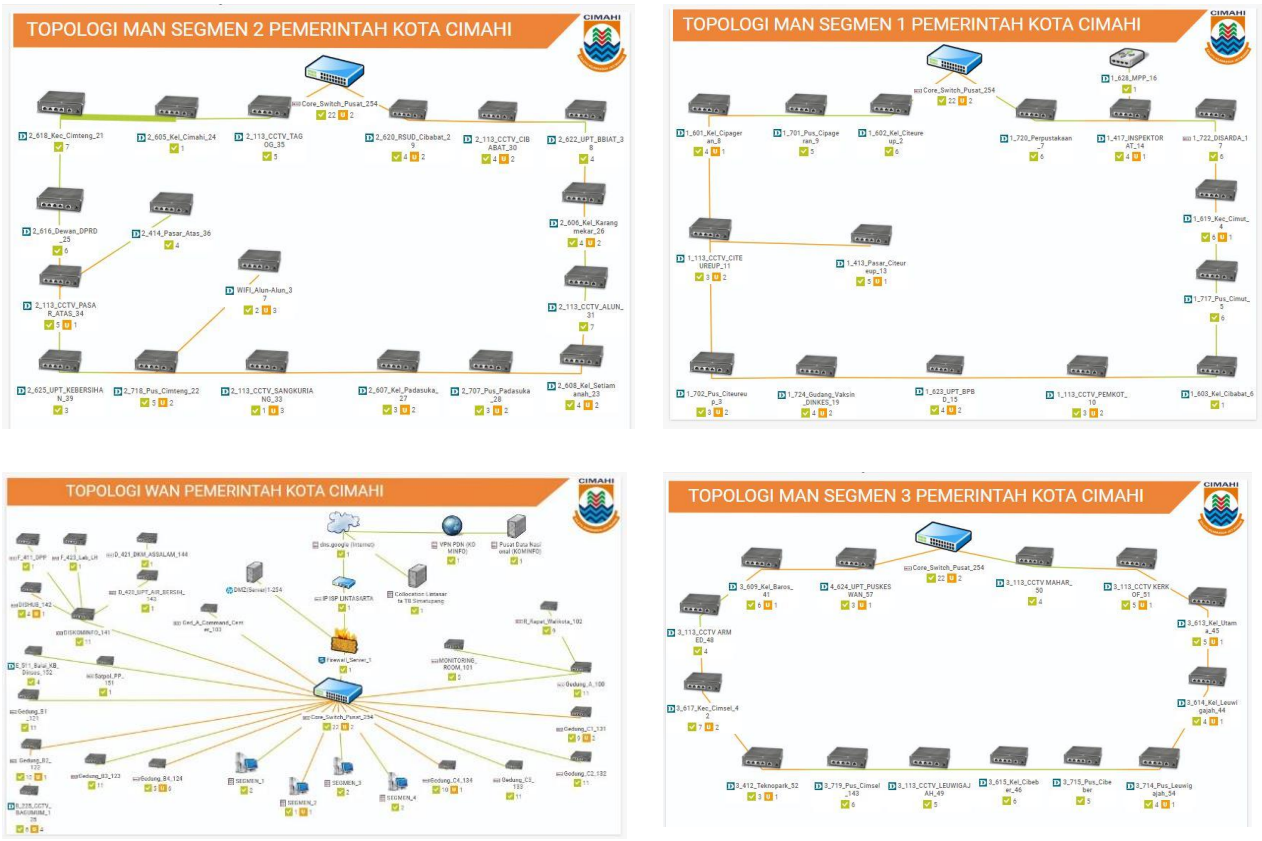
a. Meningkatnya penyelenggaraan e-government.

Penyediaan infrastruktur jaringan yang berkualitas.

Saat ini seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi jumlah Perangkat Daerah sebanyak 30 telah terlayanai layanan infrastruktur jaringan TIK yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.

Kondisi jaringan Pemerintah Kota Cimahi jalur utama (*backbone* dan tulangan) transmisi sudah mencapai ±140km tarikan *fiber optic* (fo), topologi jaringan wan menggunakan topologi ring terbagi menjadi 4 segmen menghubungkan DPRD, RSUD, Inspektorat, BPBD, 3 Kecamatan, 15 Kelurahan, 13 Puskesmas, Perpustakaan Umum, 9 UPT Dinas, menghubungkan 117 titik CCTV Satpol PP, Dinas Perhubungan dan CCTV pelayanan.

Penyediaan layanan internet untuk memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan layanan secara online terus menerus ditingkatkan kualitasnya, pada tahun 2023 kualitas bandwith yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 1.000 mbps.



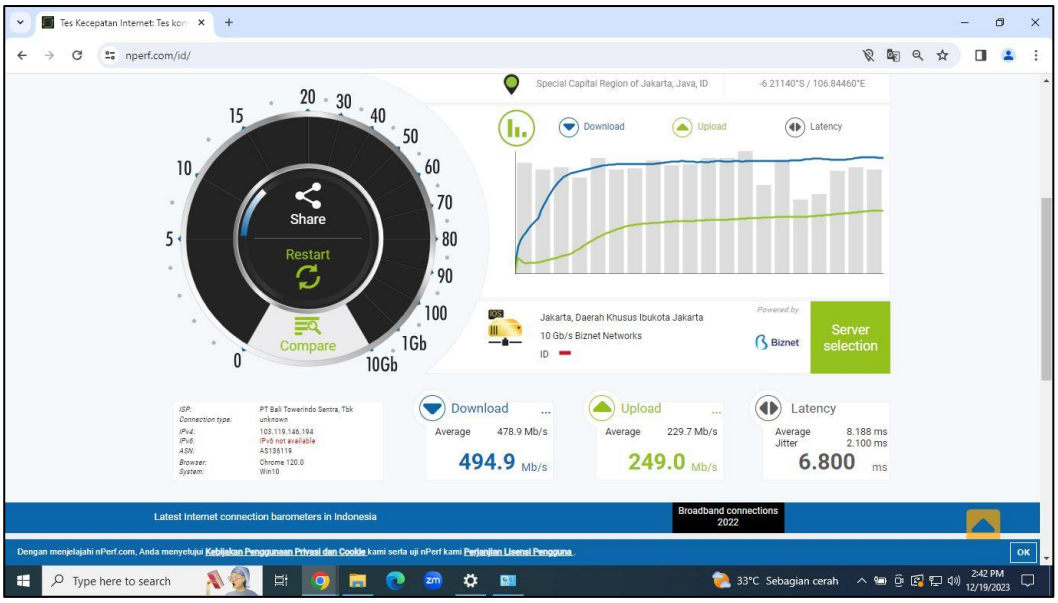
Gambar 3.3 Tipologi Wide Area Network dan Local Area Network yang dikelola oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

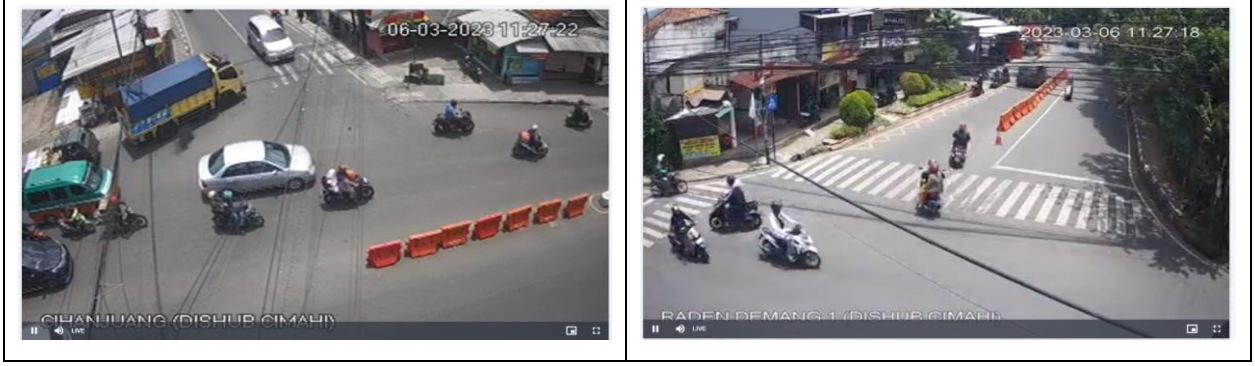
Pemanfaatan jaringan sampai dengan Tahun 2023 jumlah client setiap Perangkat Daerah maksimal sebanyak 255 dengan 1 gateway. Penyediaan layanan infrastruktur jaringan ini mendukung akses aplikasi layanan publik maupun layanan adminstrasi Pemerintah Kota Cimahi yang saat ini dapat digunakan oleh masyarakat mapun internal Pemerintah Kota Cimahi. Jalur komunikasi data (browsing, chatting, streaming, video conference, digital signage, transfer file dan cctv) dan Pelayanan publik (kependudukan, perizinan, lpse, pajak dan retribusi, puskesmas). Layanan akses internet Pemerintah Kota Cimahi saat ini kapasitas *bandwidth* 1.000 Mbps *dedicated*. Distribusi akses internet merata ke seluruh perangkat daerah yang terhubung melalui jaringan *local area network* (LAN) dan *wide area network* (WAN) serta akses wifi di gedung Pemerintah Kota Cimahi, Kecamatan dan Kelurahan serta ruang publik.

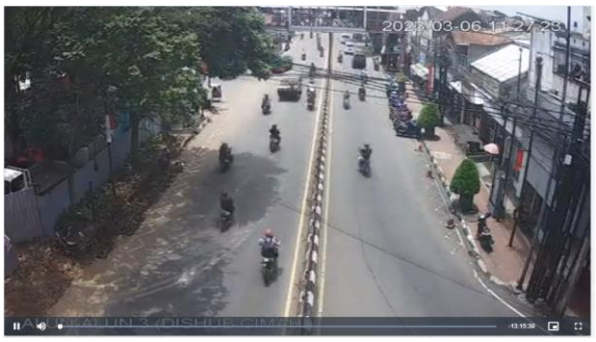


Gambar 3.4 *Speed test* yang di dapat dari Server yang menggunakan kabel LAN dan
perangkat support 1Gbps



Gambar 3.5 *Speed test* yang di dapat dari SKPD Komp. Pemkot Cimahi yang menggunakan kabel LAN dan perangkat support 1Gbps dan ketika di jam kerja.

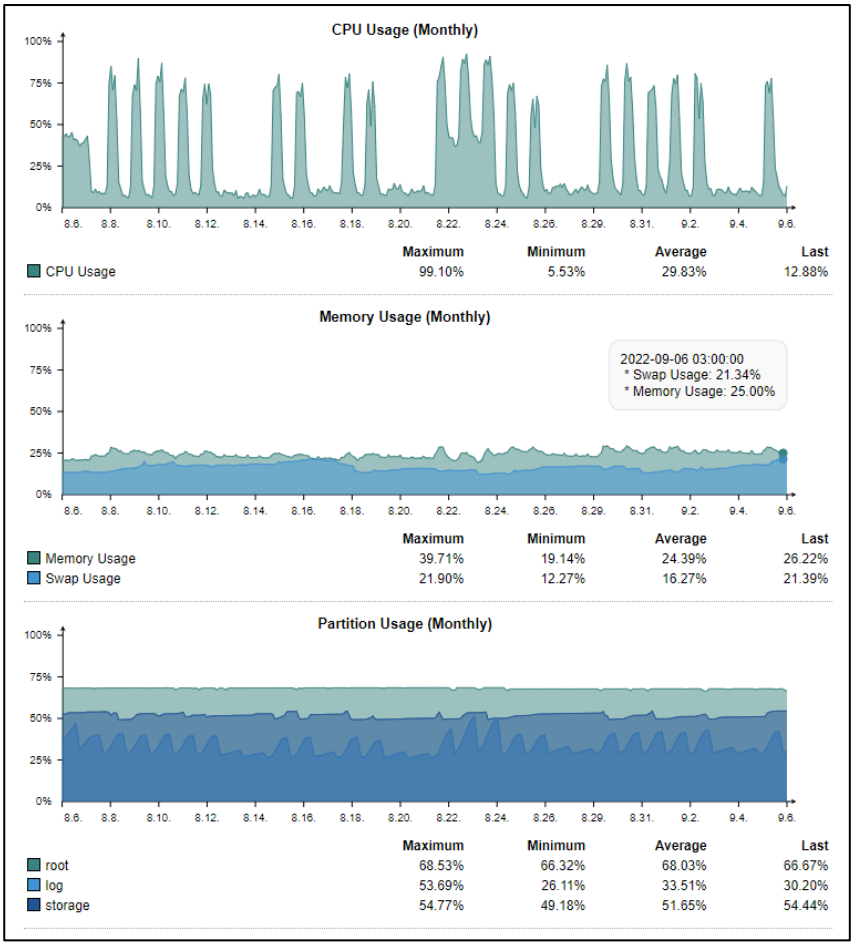


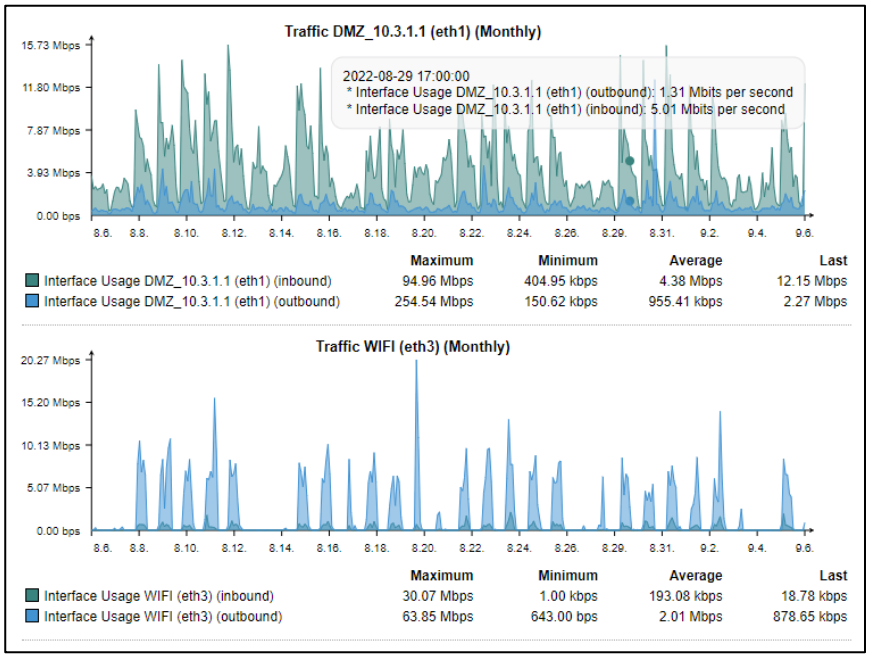


Gambar 3.6 CCTV yang terhubung melalui jaringan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Ruang lingkup aktivitas penyediaan infrastruktur jatingan terdiri dari:

1. Pengeloaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan TIK Pemerintah Kota Cimahi (Pengelolaan Jaringan LAN dan WAN)
2. Penyediaan Jaringan Internet Pemerintah Kota Cimahi
3. Penyediaan Jaringan Internet Wifi di Ruang Publik, Penyediaan Akses Point/Wifi Hotspot di Ruang Pelayanan Publik dan Area Publik dengan Spesifikasi Sewa Internet dengan Perangkat Access Point untuk Wifi Publik di 25 Lokasi
4. Penyediaan Jaringan Lastmile FO Jaringan WAN Kota Cimahi
5. Jasa Pemeliharaan Perangkat Aktif Jaringan LAN dan WAN
6. Fasiltasi vidio conference pimpinan
7. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
8. Pengadaan pendukung kegiatan lainnya.
9. Pengelolaan *command center*.



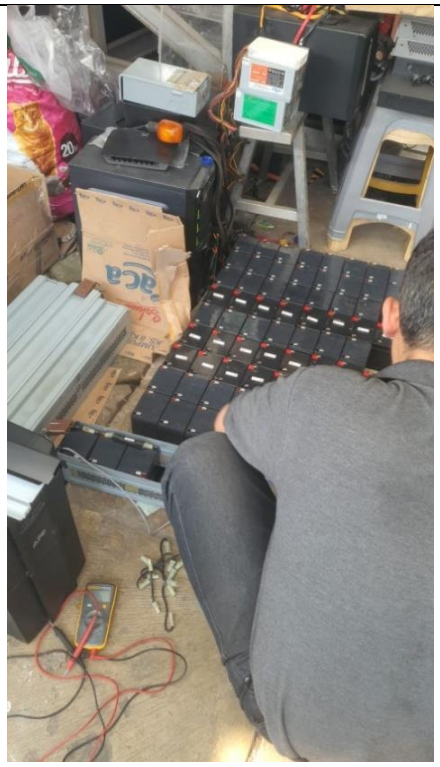


Gambar 3.7 Monitoring jaringan WAN dan LAN



Gambar 3.8 Fasitisasi video conference pimpinan







Gambar 3.9 Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan

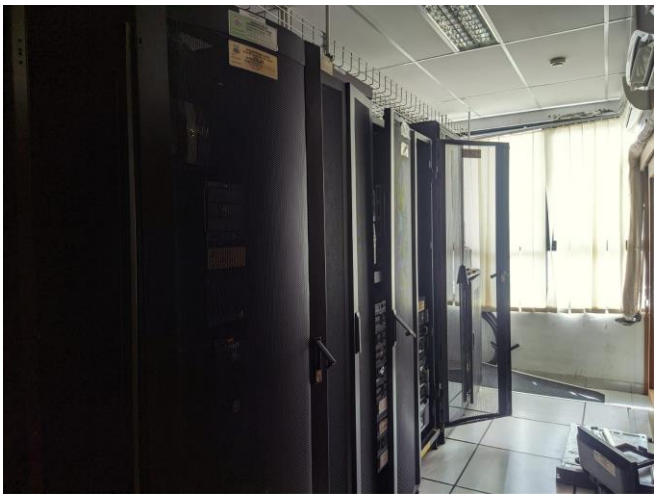
Penyediaan layanan pusat data

Layanan pusat data yang dikelola oleh Diskominfo menyediakan akses aplikasi dan data menggunakan infrastruktur jaringan komputer, sistem penyimpanan dan komputasi yang membantu pemerintah dalam menginput, memproses, menyimpan dan menyebarkan informasi dari berbagai aplilkasi layana publik maupun layanan administrasi Pemerintah Kota Cimahi.

Hasil evaluasi SPBE Tahun 2023 tingkat kematangan layana pusat data pemerintah kota cimahi mencapai level 5 memiliki arti sangat baik. Tingkat kematangan (*maturity*) pada level 5 memiliki arti bahwa pengoperasian pusat data berada pada tingkat **Optimum** Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan.







Gambar 3.10 Server Digunakan sebagai Pusat Data Elektronik Aplikasi Layanan Publik dan Administrasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selain pengelolaan data center, operasional monitoring room, perpanjangan lisensi protokol keamanan jaringan, lisensi monitoring data center dan pengelolaan command center Kota Cimahi.



Gambar 3.11 Command Center Kota Cimahi

Dalam mendukung tata Kelola SPBE telah disusun Arsitektur dan Peta Rencana ini agar merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan implementasi SPBE dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 dan mengikuti Visi, Misi, Tujuan & Strategi SPBE Nasional serta berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu dengan melakukan reverse engineering terhadap parameter dari 47 indikator yang menjadi pokok dari evaluasi SPBE. Sehingga dapat dipastikan apa yang tertuang dalam kajian ini telah memenuhi dengan konteks evaluasi dalam SPBE. Dalam Arsitektur SPBE ini mencakup domain Tata Kelola, Manajemen, Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi antara Proses bisnis, Data dan informasi, Aplikasi SPBE, infrastrukturSPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengembangan dari keenam arsitektur tersebut didukung Oleh Manajemen yang dilaksanakan dengan baik dan Tata kelola yang disusun secara rinci dan terarah. Dengan tersusunnya Arsitrktur dan Peta Rencana SPBE Kota Cimahi

diharapkan dapat meningkatkan tata kelola implementasi SPBE di Kota Cimahi.

Arsitektur SPBE mencakup domain Tata Kelola, Manajemen, Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Layanan Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Keamanan Informasi dan Audit TIK dengan harapan agar Pemerintah Kota Cimahi dapat menghadirkan transformasi digital dalam layanan internal maupun publiknya.







Gambar 3.12 Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Cimahi

Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah bertujuan untuk menyelenggarakan pengelolaan aplikasi sistem penghubung layanan serta pengelolaan interoperabilitas antar aplikasi baik antar aplikasi di internal maupun dengan aplikasi eksternal melalui:

- Peningkatkan kualitas aplikasi Sistem Penghubung Layanan.
- Pengelolaan aplikasi Sistem Penghubung Layanan.
- Penyediaan tata kelola interoperabilitas data melalui Sistem Penghubung Layanan.
- Penyelenggaraan layanan interoperabiitas data melalui Sistem Penghubungn Layanan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa setiap Pemerintah

Daerah harus menggunakan SPL untuk interoperabilitas data antar aplikasi Penyelenggaraan sistem penghubung layanan menggunakan aplikasi MANTRA. Sampai dengan tahun 2023 terdapat total jumlah layanan API yang telah didaftarkan berjumlah 39 Layanan API Publik (GSB) dan 24 Layanan API Internal (MANTRA). Untuk daftar lengkap layanan API dapat dilihat pada lampiran tabel berikut:

Tabel 3.21 Data Daftar Layanan API GSB (API Publik Pemkot)

No.	Nama Layanan (Data Dibagipakaikan)	Format File Data	Produsen Data	Pengguna Data
1	**fn_get_produk_hukum** Layanan penyediaan data produk hukum DPRD untuk Aplikasi JDIHN	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Sekretariat Dewan (https://jdih-dprd.cimahikota.go.id)	Aplikasi JDIHN dari BPHN (https://jdihn.go.id)
2	**fn_get_produk_hukum** Layanan penyediaan data produk hukum Pemerintah Daerah untuk Aplikasi JDIHN	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Bagian Hukum Setda (https://jdih.cimahikota.go.id)	Aplikasi JDIHN dari BPHN (https://jdihn.go.id)
3	**fn_get_token** Layanan autentikasi akses data harga kebutuhan pangan pokok untuk SILINDA Jabar	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian (https://uptpasar.cimahikota.go.id)	Aplikasi SILINDA dari Sekretariat TPID Jabar (https://silinda.jaba rprov.go.id)
4	**fn_input_data_harga** Layanan penyediaan data harga kebutuhan pangan pokok yang diinput ke SILINDA Jabar	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian (https://uptpasar.cimahikota.go.id)	Aplikasi SILINDA dari Sekretariat TPID Jabar (https://silinda.jaba rprov.go.id)
5	**fn_find_data_harga** Layanan pencarian harga kebutuhan pangan pokok untuk SILINDA Jabar	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian (https://uptpasar.cimahikota.go.id)	Aplikasi SILINDA dari Sekretariat TPID Jabar (https://silinda.jaba rprov.go.id)
6	**fn_find_commodity** Layanan pencarian data komoditas pangan untuk SILINDA Jabar	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian (https://uptpasar.cimahikota.go.id)	Aplikasi SILINDA dari Sekretariat TPID Jabar (https://silinda.jaba rprov.go.id)
7	**func_getdata_rinc_gaji** Layanan penyediaan data rincian gaji pegawai dari SIM Gaji Taspen	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	SIM Gaji dari Taspen (https://simgajiweb.taspen.co.id/)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi
8	**func_getdata_historis** Layanan penyediaan histori gaji pegawai dari SIM Gaji Taspen	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	SIM Gaji dari Taspen (https://simgajiweb.taspen.co.id/)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
9	**func_getdata_bynip** Layanan penyediaan data pegawai dari SIM Kepegawaian Cimahi	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SIM Gaji dari Taspen (https://simgajiweb.taspen.co.id/)

	(SIMAKCI) untuk SIM Gaji Taspen		(https://bkpsdmd.cimahikota.go.id/simakci/)	
10	**func_post_pegawai** Layanan pengiriman/input data pegawai ke SIM Gaji Taspen	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SIM Gaji dari Taspen (https://simgajiweb.taspen.co.id/)
11	**func_get_pegawai** Layanan penyediaan data pegawai yang tersimpan di SIM Gaji Taspen	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	SIM Gaji dari Taspen (https://simgajiweb.taspen.co.id/)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
12	**func_refresh_token** Layanan untuk memuat ulang token akses ke SIM Gaji Taspen	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	SIM Gaji dari Taspen (https://simgajiweb.taspen.co.id/)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
13	**insert_absensi** Layanan memasukan data absensi pegawai ke aplikasi Uptodate untuk perhitungan kinerja pegawai	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (https://sikonci.cimahikota.go.id)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (https://uptodate.cimahikota.go.id)
14	**fn_reqintegrasi** Layanan penyediaan data integrasi untuk diakses BKN	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (https://bkpsdmd.cimahikota.go.id/simakci/)	BKN (https://siasn.bkn.go.id)
15	**fn_reqsiasn** Layanan penyediaan data pegawai/asn untuk diakses BKN	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (https://bkpsdmd.cimahikota.go.id/simakci/)	BKN (https://siasn.bkn.go.id)
16	**func_get_covid19_by_district** Layanan penyediaan data jumlah penderita covid-19 per status berdasarkan kecamatan	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://covid19.cimahikota.go.id)	Diskominfo, Dinkes
17	**func_get_covid19_by_zone_category** Layanan penyediaan data zona covid-19	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://covid19.cimahikota.go.id)	Diskominfo, Dinkes
18	**func_get_covid19_by_subdistrict** Layanan penyediaan jumlah data penderita covid-19 per kelurahan	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://covid19.cimahikota.go.id)	Diskominfo, Dinkes
19	**func_get_covid19_case_unpublish**	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://covid19.cimahikota.go.id)	Diskominfo, Dinkes

	Layanan penyediaan jumlah data per status kasus covid-19			
20	**func_get_covid19_last_date** Layanan penyediaan tanggal terkahir update kasus covid-19	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://covid19.cimahikota.go.id)	Diskominfo, Dinkes
21	**func_get_covid19_case** Layanan penyediaan jumlah data per status kasus covid-19	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://covid19.cimahikota.go.id)	Diskominfo, Dinkes
22	**func_get_req_ticket_by_id** Layanan penyediaan data detail tiket layanan TIK berdasarkan ID	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://silatik.cimahikota.go.id)	Diskominfo (Silatik Mobile)
23	**func_get_req_email_by_id** Layanan penyediaan data permohonan email di SILATIK berdasarkan ID	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://silatik.cimahikota.go.id)	Diskominfo (Silatik Mobile)
24	**func_get_req_subdomain_by_id** Layanan penyediaan data permohonan sub domain di SILATIK berdasarkan ID	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://silatik.cimahikota.go.id)	Diskominfo (Silatik Mobile)
25	**func_get_layanan_by_parent_id** Layanan penyediaan data layanan berdasarkan jenis/kategori layanan	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://smartcity.cimahikota.go.id dan Cimahi SmartCity Mobile)	Diskominfo
26	**func_get_layanan** Layanan penyediaan daftar data layanan	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://smartcity.cimahikota.go.id dan Cimahi SmartCity Mobile)	Diskominfo
27	**func_get_app_search** Layanan penyediaan daftar data aplikasi berdasarkan kata kunci judul aplikasi	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://smartcity.cimahikota.go.id dan Cimahi SmartCity Mobile)	Diskominfo
28	**func_get_ip_internal** Layanan penyediaan data informasi log alamat IP yang mengakses aplikasi Cimahi Smart City	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://smartcity.cimahikota.go.id dan Cimahi SmartCity Mobile)	Diskominfo
29	**func_get_slider_apps** Layanan penyediaan daftar data media *banner* di website/aplikasi *mobile* Cimahi Smart City	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://smartcity.cimahikota.go.id dan Cimahi SmartCity Mobile)	Diskominfo
30	**func_get_intro_mobile** Layanan penyediaan data media intro di aplikasi *mobile* Cimahi Smart City	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://smartcity.cimahikota.go.id dan Cimahi SmartCity Mobile)	Diskominfo
31	**func_get_version**	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://smartcity.cimahikota.go.id dan	Diskominfo

	Layanan penyediaan data versi aplikasi *mobile* Cimahi Smart City		Cimahi SmartCity Mobile)	
32	**func_get_search_event** Layanan penyediaan daftar data konten kegiatan berdasarkan kata kunci judul kegiatan	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://smartcity.cimahikota.go.id dan Cimahi SmartCity Mobile)	Diskominfo
33	**func_get_search_news** Layanan penyediaan daftar data konten berita berdasarkan kata kunci judul berita	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://smartcity.cimahikota.go.id dan Cimahi SmartCity Mobile)	Diskominfo
34	**func_get_internal_app** Layanan penyediaan daftar data aplikasi berdasarkan kriteria jenis akses (*public/ private*)	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://smartcity.cimahikota.go.id dan Cimahi SmartCity Mobile)	Diskominfo
35	**func_get_all_maps** Layanan penyediaan data media untuk penunjukan lokasi di peta digital	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://smartcity.cimahikota.go.id dan Cimahi SmartCity Mobile)	Diskominfo
36	**func_get_app** Layanan penyediaan daftar data aplikasi	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://smartcity.cimahikota.go.id dan Cimahi SmartCity Mobile)	Diskominfo
37	**func_get_event** Layanan penyediaan daftar data kegiatan	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://smartcity.cimahikota.go.id dan Cimahi SmartCity Mobile)	Diskominfo
38	**func_get_prestasi** Layanan penyediaan daftar data prestasi	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://smartcity.cimahikota.go.id dan Cimahi SmartCity Mobile)	Diskominfo
39	**func_get_public_cctv** Layanan penyediaan daftar data akses CCTV	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	Diskominfo (https://smartcity.cimahikota.go.id dan Cimahi SmartCity Mobile)	Diskominfo

Tabel 3.22 Data Daftar Layanan API MANTRA (API Internal Pemerintah Kota (Cimahi)

No.	Nama Layanan (Data Dibagipakaikan)	Format File Data	Produsen Data	Pengguna Data
1	**data_piutang_pbb_by_nop** Layanan penyediaan data informasi tagihan piutang PBB berdasarkan NOP	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BAPPENDA	DPMPTSP (https://sipinter.cimahikota.go.id)
2	**fn_inquiry** Layanan penyediaan data informasi tagihan PBB/BPHTB/PDL	JSON	BAPPENDA	BJB (https://sip-online.cimahikota.go.id)

	berdasarkan nomor tagihan			
3	**fn_payment** Layanan fungsi untuk pembayaran pajak PBB/BPHTB/PDL berdasarkan nomor tagihan	JSON	BAPPENDA	BJB (https://sip-online.cimahikota.go.id)
4	**fn_json_rpc** Layanan fungsi inquiry/payment pajak PBB/BPHTB/PDL berdasarkan input parameter (ISO 8583)	JSON	BAPPENDA	BJB (https://sip-online.cimahikota.go.id)
5	**imb_by_name** Layanan penyediaan data informasi IMB berdasarkan nama individu	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	DPMPTSP	BAPPENDA
6	**reklame_by_lokasi_naskah** Layanan penyediaan data informasi reklame berdasarkan lokasi naskah	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	DPMPTSP	BAPPENDA
7	**fn_get_pegawai** Layanan penyediaan data informasi pegawai	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BKPSDMD	BKN
8	**fn_get_pasangan** Layanan penyediaan data informasi pasangan pegawai	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BKPSDMD	BKN
9	**fn_get_anak** Layanan penyediaan daftar data anak pegawai	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BKPSDMD	BKN
10	**fn_get_ortu** Layanan penyediaan data informasi orang tua pegawai	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BKPSDMD	BKN
11	**fn_get_token** Layanan untuk memperoleh token integrasi API dari BKN	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BKPSDMD	BKPSDMD, BKN
12	**fn_get_diklat** Layanan penyediaan daftar data diklat pegawai	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BKPSDMD	BKN
13	**fn_get_penghargaan** Layanan penyediaan daftar data penghargaan yang diperoleh oleh pegawai	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BKPSDMD	BKN
14	**fn_get_jabatan** Layanan penyediaan daftar data jabatan pegawai	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BKPSDMD	BKN
15	**fn_get_pendidikan** Layanan penyediaan daftar daftar data riwayat pendidikan pegawai	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BKPSDMD	BKN

16	**fn_get_golongan** Layanan penyediaan daftar data riwayat golongan pegawai	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BKPSDMD	BKN
17	**fn_get_kursus** Layanan penyediaan daftar data riwayat kursus pegawai	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BKPSDMD	BKN
18	**fn_opd_all** Layanan penyediaan daftar data Perangkat Daerah	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BKPSDMD	BKPSDMD, Diskominfo, Bag. Administrasi Pembangunan
19	**fn_pejabat_eksisting** Layanan penyediaan daftar data pejabat	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BKPSDMD	BKPSDMD, Diskominfo, Bag. Administrasi Pembangunan
20	**fn_pegawaiall_eksisting** Layanan penyediaan daftar data pegawai	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BKPSDMD	BKPSDMD, Diskominfo, Bag. Administrasi Pembangunan
21	**data_objek_subjek** Layanan penyediaan data informasi objek pajak	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BAPPENDA	BAPPENDA, DPMPTSP
22	**realisasi_reklame** Layanan penyediaan data realisasi pajak reklame	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BAPPENDA	BAPPENDA, DPMPTSP
23	**data_piutang_pbb_by_nop** Layanan penyediaan data informasi piutang PBB berdasarkan NOP	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BAPPENDA	BAPPENDA, DPMPTSP
24	**f_reklame** Layanan penyediaan data reklame	XML, JSON, PHP (Array, Serialize)	BAPPENDA	BAPPENDA, DPMPTSP

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik kegiatan pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk mengembangkan kuantitas dan kualitas aplikasi SPBE untuk pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang lebih baik dan terintegrasi melalui:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aplikasi SPBE layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan.
b. Menyediakan fasilitas layanan perbaikan aplikasi perangkat daerah
c. Melakukan pemeliharaan aplikasi SPBE

d. Menyusun tata kelola pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
e. Meningkatkan layanan domain dan sub domain Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Dengan lingkup perkerjaan terdiri dari:

a. Pengelolaan dukungan teknis Website Resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi (https://www.cimahikota.go.id)
b. Pengelolaan dukungan teknis Aplikasi Pengaduan Pesan Singkat Penduduk/Pesduk (https://pesduk.cimahikota.go.id)
c. Pengelolaan Dukungan Teknis Aplikasi Ekosistem Satu Data Kota Cimahi (https://satudata.cimahikota.go.id,https://data.cimahikota.go.id, https://opendata.cimahikota.go.id).
d. Pengelolaan Domain dan Sub Domain Resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi terdiri dari:
    a) Melakukan registrasi domain utama cimahikota.go.id ke Kementerian Komunikasi dan Informatika
    b) Melakukan pengelolaan layanan aplikasi *DNS*
    c) Melakukan penambahan, perubahan dan penonaktifan sub domain
    d) Melakukan instalasi sertifikat protokol keamanan SSL *(secure socket layer)* pada sub domain yang diakses publik (melalui internet)
    e) Melakukan pemeriksaan dan pengetesan aplikasi pengguna sub domain
    f) Melakukan pemblokiran terhadap sub domain-sub domain yang terkena serangan keamanan
    g) Melakukan pemantauan keamanan sub domain

    Selama tahun 2023 terdapat penambahan sub domain baru sebanyak 18 sub domain yang merupakan sub domain aplikasi dan sub domain resmi Perangkat Daerah (website resmi) terlampir

dalam tabel berikut:

Tabel 3.23 Data Penambahan Sub Domain Baru

LAPORAN REKAP PEMBUATAN SUBDOMAIN			
Tanggal Awal : Jan 01, 2023			
Tanggal Akhir : Dec 31, 2023			
#	**NAMA SUBDOMAIN**	**NAMA APLIKASI**	**PERANGKAT DAERAH**
1	caikopi.cimahikota.go.id	caikopi	Dinas Perdagangan Koperasi Perindustrian Kota Cimahi
2	setwan@.cimahikota.go.id	aplikasi Silegeg	Sekretariat DPRD Kota Cimahi
3	demobpkad.cimahikota.go.id	demobpkad	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi
4	collactce.cimahikota.go.id	CollAct-CE	Dinas Perdagangan Koperasi Perindustrian Kota Cimahi
5	dp3ap2kb.cimahikota.go.id	dp3ap2kb	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	sappeutingemas.cimahikota.go.id	SAPPEUTING EMAS	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	dilanppks.cimahikota.go.id	DilanPPKS	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Cimahi
8	ekstensifikasi.cimahikota.go.id	aplikasi ekstensifikasi	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi
9	https://lapakami.cimahikota.go.id	Layanan Publik Kecamatan Kelurahan Kota Cimahi	Dinas Komunikasi Informasi arsip dan perpustakaan
10	http://cimteng.cimahikota.go.id	Website Resmi Kecamatan Cimahi Tengah	Kecamatan Cimahi Tengah
11	dilansandi.cimahikota.go.id	Digitalisasi Layanan Persandian (DILANSANDI)	Dinas Komunikasi Informasi arsip dan perpustakaan
12	sicenting.cimahikota.go.id	SICENTING	Dinas Kesehatan Kota Cimahi
13	esurveycrud.cimahikota.go.id	API CRUD E-SURVEY DPKP	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
14	sidasitampan.cimahikota.go.id	SI DASI TAMPAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi

15	viralkeun.cimahikota.go.id	Viralkeun	Kelurahan Leuwigajah
16	e-ADMPBB.cimahikota.go.id	Administrasi PBB	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi
17	cendolasem.cimahikota.go.id.cimahikota.go.id	CENDOL ASEM	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Cimahi
18	e-pbb.cimahikota.go.id	elektrinifikasi PBB	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi

e. Penyusunan tata kelola pembangunan pengembangan aplikasi

Penyusunan tata kelola pembangunan dan pengembangan aplikasi didorong karena adanya kebutuhan sebuah dokumen sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan aplikasi di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang mencakup lingkup SDLC (*Software Development Life Cycle*).

a) Penyusunan dokumen Tata kelola Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
b) Penyusunan SOP Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
c) Penyusunan Template Formulir Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pemerintah Daerah
d) Penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

f. Pengadaan Tenaga Ahli Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi e-Governement
g. Penyusunan Tata Kelola Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi.
h. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SPBE, meliputi:

- Pemeliharaan website Pesduk (Pesan Singkat Penduduk) Kota Cimahi (https://cimahikota.go.id)
- Pemeliharaan website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi (https://diskominfo.cimahikota.go.id)
- Pemeliharaan website informasi Covid-19 Kota Cimahi (https://covid19.cimahikota.go.id)

- Pemeliharaan aplikasi Silatik (https://silatik.cimahikota.go.id)
- Pemeliharaan aplikasi *cloud storage* Cimahi Drive (https://drive.cimahikota.go.id)
- Pemeliharaan website Pemerintah Daerah Kota Cimahi (https://cimahikota.go.id)
- Pemeliharaan aplikasi SPL MANTRA dan GSB
- Pemeliharan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kagiatan (https://sijaki.cimahikota.go.id)
- Pemeliharaan aplikasi WBS
- Pemeliharaan website resmi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Cimahi (https://disarda.cimahikota.go.id)
- Pemeliharaan website Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Cimahi (https://ppid.cimahikota.go.id)
- Pengembangan aplikasi berbasis website Layanan Publik Kecamatan Kelurahan Kota Cimahi (https://lapakami.cimahikota.go.id)
- Pemeliharaan website resmi Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi (https://bakesbangpol .cimahikota.go.id)

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas pada Tahun Anggaran 2023 menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan Kota Cimahi menjadi kota cerdas, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

a. Monitoring dan evaluasi implementasi *masterplan smart city* di Kota Cimahi
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola program *smart city*
c. Kegiatan Riset Rating Transformasi Digital Indonesia (RTDI) dan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI).
d. Penyusunan *Masterplan Smart City* 2023-2026

e. Pameran Virtual Implementasi Program *Smart City*

f. Sosialisasi Program *Smart City* melalui Talk Show Radio Kepada Masyarakat dengan Tema Edukasi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

g. Pelaksanaan Survei Dampak Program *Smart City*

Pelaksanaan survei dampak program *smart city* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak terhadap masyarakat dari pelaksanaan program *smart city* di masing-masing daerah. Survei dilaksanakan pada masing-masing sub dimensi *smart city* yaitu sebanyak 18 sub dimensi. Masing-masing sub dimensi dilaksanakan survei terhadap 50 responden masyarakat pemanfaat pada satu program *smart city*. Sehingga total responden yang disurvei sebanyak 900 responden.

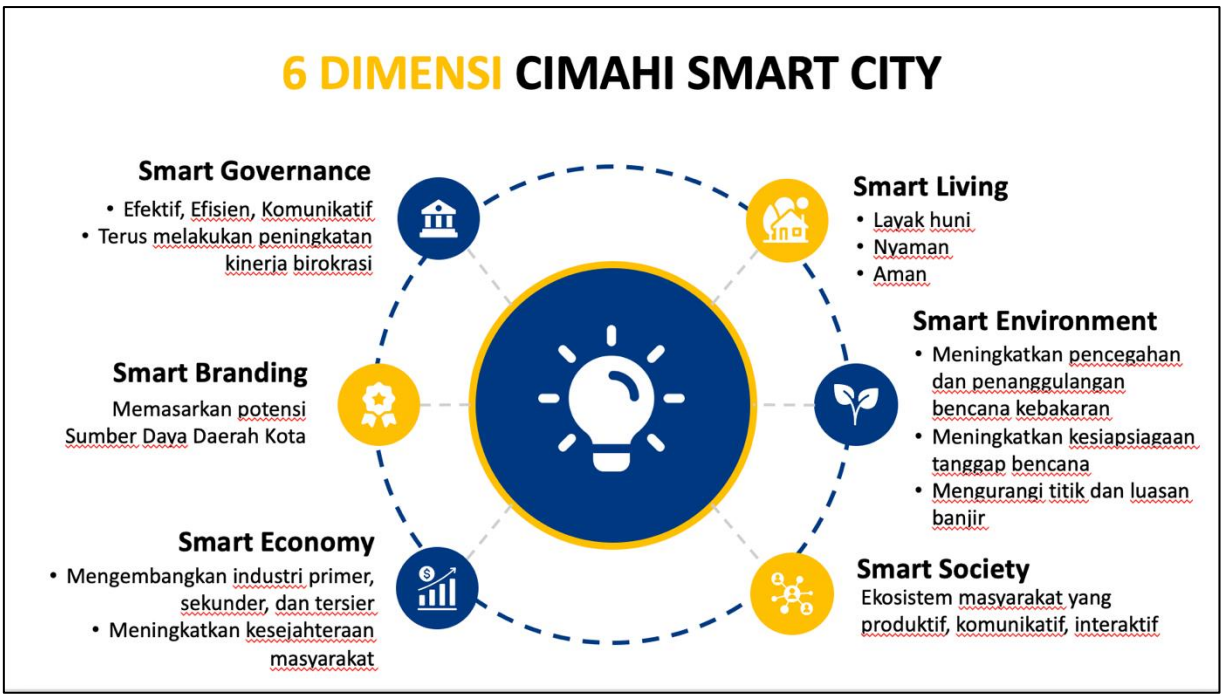
Tabel 3.24 Daftar Program Smart City Yang Disurvei Dampak Tahun 2023

No	Dimensi/Sub Dimensi	Nama Program Smart City/Layanan	Pengelola
1	**Smart Governance**		
1.1	Sub Dimensi Layanan Publik	DILANDACITA	Disdukcapil
1.2	Sub Dimensi Kebijakan Publik	Kompetisi Inovasi Cimahi Motekar Award (ChiMA)	Bappelitbangda
1.3	Sub Dimensi Tata Kelola Birokrasi	Sistem Kehadiran Berlokasi ASN Cimahi (SIKONCI)	BKPSDMD
2	**Smart Branding**		
2.1	Sub Dimensi Membangun Ekosistem Pariwisata	Cimahi *Military Heritage Tourism* (CIMITAGE)	Disbudparpora
2.2	Sub Dimensi Membangun Platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah	Sistem Informasi Perizinan Online (SIPINTER)	DPMPTSP
2.3	Sub Dimensi Membangun dan Memasarkan Wajah Kota	Pengembangan Kawasan Alun-Alun Cimahi	DPKP
3	**Smart Economy**		
3.1	Sub Dimensi Ekosistem Industri yang Berdaya Saing	Cimahi*Maker Space*	Disdagkoperin/UPTD CTP
3.2	Sub Dimensi Kesejahteraan Rakyat	SIDAKEPTRI	Disnaker

No	Dimensi/Sub Dimensi	Nama Program Smart City/Layanan	Pengelola
3.3	Sub Dimensi Ekosistem Transaksi Keuangan	Pembayaran Pajak Daerah melalui QRIS dan Virtual Account	Bappenda
4	**Smart Living**		
4.1	Sub Dimensi Harmonisasi Tata Ruang Wilayah	Eco Green Rusunawa	DPKP/UPTD Rusunawa
4.2	Sub Dimensi Prasarana Kesehatan	Tegar Gandawasa	RSUD
4.3	Sub Dimensi Ketersediaan Sarana Telekomunikasi dan Transportasi	Smart PJU	Dishub
5	**Smart Society**		
5.1	Sub Dimensi Interaksi Masyarakat yang Efisien	Cimahi Reading Habit	Disarda
5.2	Sub Dimensi Ekosistem Belajar yang Efisien	PPDB Online	Disdik
5.3	Sub Dimensi Sistem Keamanan Masyarakat	Sistem Informasi Kebencanaan Daerah (SIBEDA)	BPBD
6	**Smart Environment**		
6.1	Sub Dimensi Program Proteksi Lingkungan	PATALI	DLH
6.2	Sub Dimensi Tata Kelola Sampah dan Limbah	AWAS SIKOMA	DLH
6.3	Sub Dimensi Tata Kelola Energi yang Bertanggung Jawab	Biodegester	DLH

h. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kola cerdas

Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kola cerdas *(smart city)* dimaksud.



Gambar 3.13 6 Dimensi Smart City

Berdasarkan lima (5) dimensi dengan formulasi perhitungan yang berbeda, yakni:

a. *Baseline* (bobot 10%), menggambarkan penilaian terhadap peraturan untuk menetapkan dokumen masterplan kola cerdas *(smart city)* di kabupaten/kota, aktivitas dewan *smart city* dan tim pelaksana *smart city*, dan realisasi program dan rencana aksi *smart city* di tahun sebelumnya.

b. *Output* (bobot 20%), terbentuknya pondasi untuk pelaksanaan program *smart city*, untuk menilai sejauh mana pemerintah kota/kabupaten menyiapkan kebijakan, kelembagaan, serta anggaran untuk program smart city.

c. *Impact* (bobot 20%), mencakup manfaat yang dirasakan masyarakat atas implementasi program *smart city*, untuk mengukur manfaat dan perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan program yang telah berjalan

d. Program Percepatan atau *Quick Win* (bobot 20%), mencakup tingkat inovasi program percepatan *smart city*, untuk menilai kreativltas dan daya inovasl pada program percepatan *(Quick Win).*
e. *Outcome* (bobot 30%), mencakup pelaksanaan rencana yang ada di *masterplan smart city,* untuk menilai sejauh mana setiap rencana dijalankan oleh pemerintah daerah.

Hasil penilaian dari lima dimensi tersebut dikategorikan menjadi dua (2), yakni:

a. lndeks Pencapaian atau Rata-rata Bobot *(performance)* merupakan tingkat pembangunan *smart city* dari masing-masing daerah. lndeks Pencapaian diperoleh dengan menghitung rata-rata *Baseline, Output, Outcome, Impact,* dan *Quick Win.*
b. lndeks Peningkatan (tingkat *improvement)* merupakan tingkat perbaikan yang terjadi pada tiap daerah setelah mengikuti Gerakan Menuju Kota Cerdas *(Smart City).* lndeks Peningkatan (tingkat *improvement)* diperoleh dengan menghitung selisih antara rata-rata Baseline, *Output, Outcome, Impact, dan Quick Win* terhadap nilai tahun lalu.

Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas *(smart city)* dimaksud, dilengkapi dengan masukan dari para asesor yang mendeskripsikan beberapa poin kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi untuk masing-masing kabupaten/kota. Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas Kota Cimahi Tahun 2023 mendapat nilai final 3,51, dengan tingkat improvement sebesar 0,03 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.25 Nilai Evaluasi Program *Smart City* Kota Cimahi Tahun 2019-2023

Tahun	Baseline	Output	Outcome	Impact	Quick Wins	Nilai Final	Tingkat Improvement
2019	3,33	3,79	3,85	3,00	1,98	3,34	0,01
2020	3,34	3,09	3,63	3,5	3,27	3,42	0,03
2021	3,9	3,43	3,75	3,14	3,39	3,48	0,06
2022	3,8	3,25	3,64	2,99	3,81	3,48	0
2023	3,96	3,11	3,52	3,48	3,7	3,51	0,03

Sumber: Laporan hasil evaluasi implementasi program smart city Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023 dengan skala penilaian maksimal 4

Tabel 3.26 Hasil Evaluasi Implementasi *Smart City* Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Nilai Final	Tingkat Improvement	Keterangan
1	Surakarta	3,84	0,04	KPPN & IKN
2	Kota Bandung	3,83	-0,06	Reguler
3	Kota Madiun	3,71	0,08	Reguler
4	Kabupaten Gunung Kidul	3,66	0,15	KPPN & IKN
5	Kota Surabaya	3,65	0,25	Reguler
6	Kota Semarang	3,64	-0,11	KPPN & IKN
7	Kabupaten Demak	3,63	0,02	KPPN & IKN
8	Kota Yogyakarta	3,58	-0,06	KPPN & IKN
9	Kabupaten Bantul	3,56	0,09	KPPN & IKN
10	Kabupaten Wonogiri	3,52	0,22	KPPN & IKN
11	Kota Cimahi	3,51	0,03	Reguler

Sumber: Laporan hasil evaluasi implementasi program smart city Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 terhadap 141 kabupaten/kota
Keterangan: KPPN = Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional
IKN. = Kawasan Ibu Kota Negara

Capaian ini berada pada peringkat ke 2 tingkat improvement implementasi smart City di Provinsi Jawa Barat, peringkat 4 penilaian reguler Implementasi *Smart City* Nasional dan Peringkat 11 penilian reguler, KPPN dan IKN Implementasi *Smart City* Nasional.

b. Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan komunikasi publik yang efektif dan efisien.

Sasaran penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan komunikasi publik adalah seluruh lapisan masyarakat di Kota Cimahi, agar informasi pembangunan daerah dan komunikasi publik berjalan dengan efektif dan efisien didukung oleh pelaksanaan sub kegiatan Layanan Hubungan Media, Pelayanan Informasi Publik dan

Pengelolaan Media Komunikasi Publik. Dengan pelaksanaan kegiatan meliputi:

Penyelenggaraan layanan 10 layanan penyebarluasan infromasi publik.

Pada Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media ada 10 Layanan yang dilaksanakan agar terlaksananya Komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat sehingga pencapaian-pencapaian Pemerintah Kota Cimahi tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Layana yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Layanan Naskah Release Berita (Press Release) yang di publikasikan kepada media sebanyak 125 Release.
2. Layanan Advetorial/Filler/Talkshow/ILM/Liputan Berita di TV Nasional dan Daerah sebanyak 18.
3. Layanan Talkshow/Greeting/ILM/Reportase di Radio Daerah sebanyak 10.
4. Layanan Advetorial di SKH/SKM/Majalah sebanyak 38.
5. Layanan advertorial di Media Online sebanyak 58.
6. Layanan Penerbitan artikel di media cetak sebanyak 1.928 artikel.
7. Layanan Penerbitan artikel di media online sebanyak 3.465 artikel
8. Layanan Penerbitan iklan display media cetak sebanyak 122 media.
9. Layanan Iklan display media online sebanyak 245 media.
10. Layanan informasi melalui spanduk/baligho/banner sebanyak 90 Baligho & spanduk.

Dengan diselenggarakannya layanan tersebut diharapkan informasi-informasi pembangunan yang menjadi prioritas Kota Cimahi dapat disampaikan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Kota Cimahi

Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR!

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat

Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.

Kinerja Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peresentase penyelesaian pengaduan sebesar 100%, dari 101 laporan pengaduan seluruhnya dapat diselesaikan dengan baik.
2. Rata-rata hari tindak lanjut pelaporan ialah 1,2 hari kerja.

Semangat pelaksanaan pengelolaan span lapor di Kota Cimahi merupakan gambaran nyata dari upaya pemerintah daerah Kota Cimahi melalui dinas komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan penyerapan aspirasi dan pengaduan dari masyarakat guna meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya di Kota Cimahi.

Sistem Permohonan Informasi Kota Cimahi (SIMPONI)

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan good governance. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah mengimplementasikan pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyediaan permohonan informasi dari masyarakat. Dalam rangka mengimplementasikan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana pelayanan permohonan informasi yang efektif dan responsif merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas

Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi meluncurkan Sistem Permohonan Informasi Kota Cimahi (SIMPONI).

Dengan adanya pengembangan, yaitu Akselerasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui SIMPONI akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkannya karena pada SIMPONI terdapat menu khusus pada website yaitu permohonan informasi yang dapat diajukan secara online dan registrasi online. Selain itu terdapat kategorisasi pada jenis dokumen layanan informasi sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk mencari dan mengakses dokumen tersebut.

Sistem Permohonan Informasi Kota Cimahi (Simponi) akan terus melakukan inovasi dan penyebar luasan informasi secara terintegrasi untuk memudahkan masyarakat dan stake holder terkait dalam memperoleh layanan informasi publik yang akurat dan tepat. Dengan Simponi pelayanan permohonan informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, masyarakat dapat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan pada saat melakukan permohonan informasi sesuai dengan kebutuhan karena dapat mengakses langsung proses layanan yang diajukan melalui website PPID Kota Cimahi dengan alamat whttps://ppid.cimahikota.go.id.

Gambar 3.14 Tangkapan layar halaman muka aplikasi Simponi



Selain kegiatan rutin berupa pelayanan Informasi Publik atau permohonan informasi, diskominfo Kota Cimahi melalui bidang informasi komunikasi publik dan statistik juga melaksanakan beberapa kegiatan strategis lainnya diantaranya:

- Akselerasi pelayanan informasi publik kota Cimahi tahun 2023 dengan menghadirkan tenaga ahli dari komisi informasi Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh seluruh perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Cimahi.
- Penguatan dan konsolidasi layanan SP4N-LAPOR yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Barat hingga kementerian pendayagunaan dan reformasi birokrasi.
- Dan kegiatan lainnya yang mendukung terciptanya pelayanan informasi publik yang baik.

Pengelolaan Informasi Publik

Pada tahun 2023, pengelolaan media komunikasi publik diskominfo kota Cimahi telah mempublikasikan berbagai macam informasi pada media internal, informasi tersebut meliputi berita, artikel, pengumuman, hingga konten video dan Grafis pada media sosial Pemerintah Daerah Kota Cimahi (@humascimahi) dan website www.cimahikota.go.id

Rincian jumlah detail rekap publikasi media internal tahun 2023 sebagai berikut :

- Total publikasi pada Instagram humas Kota Cimahi tahun 2023 adalah 506 konten publikasi
- Berita yang dipublikasikan pada website Pemerintah Daerah Kota Cimahi berjumlah 413 publikasi
- Pengumuman dan dokumen perangkat daerah lainnya yang dipublikasikan pada website Pemerintah Daerah Kota Cimahi berjumlah 278 pengumuman atau dokumen
- Artikel yang dipublikasikan pada website Pemerintah Daerah Kota Cimahi berjumlah 65 artikel
- Video pada akun YouTube humas Kota Cimahi yang diunggah ialah sebanyak 33 video
- Banner digital atau poster yang diunggah sebanyak 13 poster digital.

Total publikasi media internal tahun 2023 dalam pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik ialah sebanyak 1308 publikasi.

Selain publikasi pada media internal bidang informasi komunikasi publik dan statistik diskominfo Kota Cimahi juga melaksanakan kegiatan monitoring karakteristik berita pada media cetak sepanjang tahun 2023. Dari hasil pelaksanaan monitoring karakteristik berita pada media cetak didapati data bahwa dari total 2630 berita mengenai Kota Cimahi yang terbit pada media cetak terdapat 82% berita bernada positif 7% berita bernada netral dan 11% berita bernada negatif.

c. Meningkatnya tata kelola statistik sektoral daerah

Peningkatan tata kelola statistik sektoral di Kota Cimahi di lakukan melalui:

a. Pembentukan PIC Pengelola Data Sektoral di seluruh Perangkat Daerah yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menginput data sektoral pada perangkat daerah ke dalam portal open data Cimahi.
b. Melakukan Rapat Koordinasi Data Sektoral dan Statistik sektoral serta Evaluasi Publikasi Data Kota Cimahi secara berkal untuk meningkatkan ketesediaan dan kualitas data.
c. Melaksanan FGD Penyusunan Rumusan dan Katalog Metadata Kota Cimahi.
d. Perlaksanaan Rapat intergrasi dan interopabilitas data Kota Cimahi dalam Mendukung Satu Data Indonesia.
e. Penyusunan Dokumen Arsitektur Satu Data.
f. Melakukan Peningkatan Kemampuan SDM Penguatan Satu Data (Data Analysis and Machine Learning)
    - Survey penyelenggara Peningkatan Kemampuan SDM Penguatan Satu Data (Data Analysis and Machine Learning))
    - Pendaftaran materi Peningkatan Kemampuan SDM Pengelolaan Data Statistik Sektoral (Data Analysis and Visualisation (Penguatan Data Sektoral Penguatan Satu Data (Data Analysis and Machine Learning))
    - Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan SDM Penguatan Satu Data (Data Analysis and Machine Learning)).

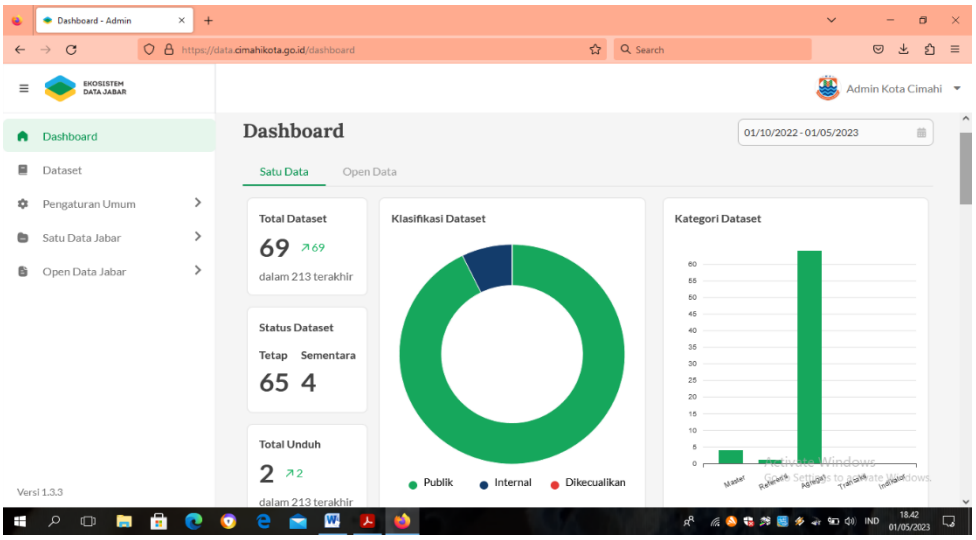
- Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kemampuan SDM Penguatan Satu Data (Data Analysis and Machine Learning)).

g. Pelaksanaan Pengelolaan Ketersediaan Data Statistik Sektoral dan Publikasi Data.

h. Pelaksanaan Publikasi Data Statistik Sektoral pada Open Data Kota Cimahi.

i. Melaksanakan pengelolaan Ekosistem Satu Data Kota Cimahi yang terintegrasi dengan Ekosistem data Jawa Barat, dengan tahapan walidata berpedoman pada tahapan SDI meliputi Perencanaan, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, Penyebarluasan Data dengan dilengkapi oleh metadata serta melakukan monitoring pelaksanaan penginputan dan publikasi data :

Gambar 3.15 Tangkapan layar pengelolaan aplikasi opendata Kota Cimahi



j. Melakukan monitoring data set pada satu data dan open data Kota Cimahi terkait data set yang diakses oleh masyarakat pada masing-masing perangkat daerah yang pada aplikasi satu data Kota Cimahi sebagai hasil reflikasi satu data Jawa Barat

k. Melakukan fungsi walidata yang berpedoman pada tahapan SDI : Perencanaan, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, Penyebarluasan Data dengan dilengkapi oleh metadata serta melakukan monitoring pelaksanaan penginputan dan publikasi data

Tabel 3.27. Analisis Permasalahan dan Alternatif solusi yang telah dilakukan

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Teknologi belum terpadu, Interoperabilitas belum sepenuhnya tersusun dan terimplementasikan.	Berkoordinasi dan berkosnultasi dengan Pemerintah Provisni Jawa Barat untuk bekerjasama memanfaatkan teknologi dan sistem informasi pengelolaan data statistik sektorl agar tercipta interoperabilitas data statistik sektoral. Saat ini open data cimahi sudah terhubung dengan ekostistem data Jawa Barat melalui replikasi aplikasi Open Data
2.	Jadwal rilis belum tepat waktu	Mendorong Perangkat Daerah sebagai produsen data melalui PICnya melalui rapt koordinasi, pelatihan dan lainnya agar data sektoral dapat dipublikasikan tepat waktu.
3	Belum lengkapnya metadata pada dataset yang dipublikasi.	Melakukan bimbingan teknis kepada seluruh PIC Perangkat Daerah berkaitan dengan kelengkapan dan penyusunan metadata sesuai dengan peraturan yang berlaku bekerjasama denga BPS Kota Cimahi
4	Belum standarnya kelembagaan pada urusan statistik.	Saat ini penyelenggaraan urusan statistik yang dilakanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi secara teknis dilaksanakan oleh pejabat eselon IV. Kondisi ini menjadikan penyelenggaraan urusan statistik belum optimal. Sehingga diperlukan peningkatan kelembagaan agar penglolaan data statistik sektoral di Kota Cimahi dapat meningkat lebih baik.

d. Meningkatnya kemanan informasi pemerintah daerah

Peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah didukung oleh pelaksanaan berbagai kegiatan sebagai berikut:

Pengukuran Indeks KAMI Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Pengukuran Indeks KAMI dilakukan menggunakan metode self assesment dengan menggandeng pihak ketiga dalam mengidentifikasi evidences yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan verifikasi oleh BSSN. Identifikasi evidences ini merupakah salah satu langkah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi untuk mengetahui nilai real Pemerintah Kota Cimahi

terkait indeks keamanan informasi. Penyusunan evidences ini tidak mudah karena setelah diidentifikasi ternyata sangat banyak dokumen yang harus dipersiapkan. Sementara, hasil self assesment Indeks KAMI Kota Cimahi pada Tahun 2023 yaitu Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar yang bernilai 417, dengan skor kategori sistem elektronik dengan kategori Tinggi, tidak berubah di Tahun sebelumnya.

Kegiatan ini harus menjadi concern Pemerintah Kota Cimahi di Tahun 2023 karena dengan tersusunnya INDEKS KAMI ini, kita dapat mengetahui beberapa values, yaitu :

a. Memberikan nilai tambah keamanan sistem atau informasi bagi pengelola yang mempunyai fungsi untuk pelayanan publik.
b. Mengetahui tingkat kelengkapan dan kematangan keamanan informasi yang diterapkan pada setiap Perangkat Daerah dan mengetahui tingkat kerentanan keamanan sistem sebelum pihak lain yang menemukannya.

Vurneralbility Assesment* and *Penetration Test

Security Assesment Aplikasi/SIM/Website atau yang sering dikenal dengan istilah *Penetration Test*, dilaksanakan untuk menemukan titik-titik kelemahan sebuah sistem, menganalisa dan mengetahui tingkat kerentanan keamanan sistem sebelum pihak lain yang menemukannya, verifikasi keamanan konfigurasi, menemukan kesenjangan terhadap kepatuhan, pengujian teknologi baru, memberikan nilai tambah keamanan sistem atau informasi bagi aplikasi aplikasi yang mempunyai fungsi untuk pelayanan publik dan aparatur pemerintah. Dengan Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut:

a. Pendataan aplikasi dan domain yang terkait dengan pelayanan publik;
b. Pelaksanaan pengadaan langsung penyedia *security Assesment* Aplikasi dan Domain;
c. Pelaksanaan *security Assesment* Aplikasi dan Domain yaitu Penilaian kerentanan keamanan terhadap Sistem/Aplikasi/SIM

meliputi Layanan yang menggunakan koneksi internet (website, VPN *endpoint*, infrastruktur *e-mail*, *extranet*, dan lain-lain), Sistem internal atau servis yang terdapat di dalam jaringan (*Active Drectory, Exchange*, dan lain-lain), Beberapa aplikasi tertentu (dibeli atau dikembangkan sendiri oleh organisasi atau SKPD), Jaringan internal di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Kegiatan tersebut memiliki value dan manfaat antara lain :

a. Memberikan nilai tambah keamanan sistem atau informasi bagi aplikasi aplikasi yang mempunyai fungsi untuk pelayanan publik dan aparatur pemerintah.
b. Menemukan titik-titik kelemahan sebuah sistem, menganalisa dan mengetahui tingkat kerentanan keamanan sistem sebelum pihak lain yang menemukannya.
c. Membantu menjaga organisasi terhadap kegagalan melalui pencegahan kerugian finansial;
d. Mengidentifikasi dan mengatasi risiko sebelum terjadi pelanggaran keamanan, sehingga mencegah kerugian finansial yang disebabkan oleh keamanan pelanggaran.
e. Layanan proaktif, memberikan informasi tak tergoyahkan yang membantu organisasi untuk memenuhi aspek audit kepatuhan atau peraturan.
f. Mengevaluasi efektivitas produk keamanan yang ada dan memberikan dukungan argumen untuk investasi masa depan atau upgrade teknologi keamanan.
g. Membantu bentuk strategi keamanan informasi melalui identifikasi cepat dan akurat dari kerentanan; penghapusan proaktif diidentifikasi risiko; pelaksanaan tindakan korektif; dan peningkatan pengetahuan IT.
h. Memberikan informasi rinci tentang yang sebenarnya ancaman keamanan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada pertengahan Tahun 2023, tepatnya pada triwulan II. Berikut merupakan 9 SKPD yang sistem elektroniknya telah dilaksanakan pentest pada Tahun 2023, yaitu:

a) bpumgoci milik Disdagkoperin;
b) website dinas milik Disdagkoperin;
c) sistem elektronik milik Disdukcapil;
d) SIPINTER milik DPMPTSP;
e) SIPMKS milik Dinsos;
f) Simantan milik DPKP;
g) Simbah milik DLH;
h) Sitarung milik DPUPR; dan
i) cimahikota.go.id milik Diskominfo.

Fasilitasi Jamming (Permohonan bantuan dari PASPAMPRES berkoordinasi dengan Diskominfo Provinsi)

Fasilitasi Jamming untuk pengamanan VVIP Presiden RI dilaksanakan pada 5-6 Maret Tahun 2023 diwilayah kabupaten dan Kota Bandung dan 12 Juli 2023 di wilayah Kabupaten Bandung. Dilakukan pengecekan peralatan secara berkala dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Ke depannya, Tim Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi akan secara aktif menawarkan pengoperasian alat jammer sebagai pengacak sinyal telekomunikasi untuk rapat-rapat terbatas yang dipimpin oleh Pemimpin Daerah.

Penyediaan Mail Server (@cimahikota.go.id)

Pada Tahun 2023, telah dilaksanakan peralihan kewenangan terkait pengelolaan surat elektronik resmi untuk pegawai Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Perangkat Daerah (dengan domain @cimahikota.go.id) yang awalnya dikelola oleh Seksi Pengelolaan Aplikasi, sampai dengan laporan ini disusun, pengelolaan surat elektronik tersebut di kelola oleh Seksi Persandian dan Pengembangan Sumber Daya Telematika. Peralihan kewenangan ini antara lain sebagai bentuk **akselerasi** penerbitan sertifikat

elektronik untuk pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Tabel 3.28 Pengelolaan Mail Server Tahun 2021 dan Tahun 2023

JUMLAH SURAT ELEKTRONIK BERDOMAIN cimahikota.go.id YANG SUDAH DITERBITKAN		
Tahun 2021	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**
526	3.768	5.080

Pendampingan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Sertifikat Elektronik adalah tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Dalam rangka implementasi Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi melalui aplikasi SRIKANDI, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi secara terstruktur melaksanakan pendampingan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan di Tahun 2022, dimana di Tahun 2023 ini dilaksanakan lebih massive dari pada tahun sebelumnya. Kegiatan ini tidak beranggaran. Berikut merupakan progress penerbitan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik di Tahun 2022 dan 2023.

Tabel 3.29 Pengelolaan Sertifikat Elektronik Tahun 2022 dan Tahun 2023

JUMLAH SERTIFIKAT ELEKTRONIK KOTA CIMAHI			
Tahun 2022		**Tahun 2023**	
Permohonan	Penerbitan	Permohonan	Penerbitan
330	330	985	985
100%		**100%**	

***Security Awareness* (JUMATKAMI)**

Security Awareness atau kesadaran keamanan adalah pengetahuan, pemahaman dan sikap anggota organisasi terkait perlindungan aset fisik dan non fisik dan terutama informasi pribadi dan organisasi itu sendiri. Mengapa *security awareness* itu penting bagi sebuah organisasi:

a. Memenuhi persyaratan ISO 27001 (2022) sesuai website Itg.id, ISO 27001 adalah sebuah dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) atau *Information Security Management System* (ISMS) yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi dalam mengimplementasikan konsep keamanan informasi.
b. Mengatasi ancaman keamanan informasi yang cepat dan selalu berubah, menjaga nilai organisasi (selaras dengan tujuan manajemen risiko).
    a) Mencegah serangan *social engineering*. Dalam hal ini, pencegahan serangan *social engineering* bertujuan untuk memastikan pegawai menyadari pentingnya perlindungan akan informasi sensitif, pa yang harus dilakukan untuk menangani informasi dengan aman, Risiko kesalahan penanganan informasi, konsekuensi organisasi dan pribadi dari kesalahan penanganan informasi sensitif.
    b) Merupakan program berkelanjutan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan program berkelanjutan adalah program yang tidak hanya disampaikan sebagai kegiatan tahunan, melainkan digunakan sebagai aktivitas untuk mempertahankan tingkat *security awareness* yang tinggi setiap hari.

    Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi menerapkan kegiatan *Security Awareness* dengan jargon #JUMATKAMI (Jumat Kabar Keamanan Informasi) dimana setiap Hari Jum'at di setiap minggunya, Tim Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

menyebarluaskan informasi dalam bentuk flyer terkait *Cyber Security* di group media sosial dengan tujuan agar pembaca memahami hakekat keamanan informasi itu adalah sesuatu hal yang penting dan budaya mengabaikan hal yang sangat penting dalam hal keamanan informasi ini berubah seiring waktu.

Kegiatan *Security Awareness* ini telah dilaksanakan dari awal Tahun 2023, secara konsisten, Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi telah menyebarkan sebanyak 104 edisi. Agar kegiatan ini dapat diukur keberhasilannya, pada Triwulan I, Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi telah mempersiapkan kuesioner untuk mengetahui kondisi awal tingkat pengetahuan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi terkait keamanan informasi dalam bersosial media. Berikut merupakan draft pertanyaan yang akan disampaikan kepada responden (PNS Kota Cimahi):

a) Apakah anda mengganti password akun media sosial anda secara berkala?
b) Apakah anda sering (dalam seminggu) mengakses media sosial di fasilitas wifi publik?
c) Apakah anda merasa percaya informasi pribadi anda terlindungi di media sosial?
d) Apakah anda memahami dan mengerti tentang pentingnya keamanan informasi pada media sosial?
e) Apakah anda berpikir terlebih dahulu sebelum anda melakukan posting foto atau pesan di media sosial (untuk menghindari postingan anda disalahgunakan)?
f) Apakah informasi pribadi yang ada di sosial media anda adalah informasi yang sebenarnya?
g) Apakah informasi data diri dan kegiatan anda yang ada di sosial media anda terbuka untuk umum?
h) Apakah anda memanfaatkan setting privasi di media sosial?

i) Apakah anda hanya menambahkan orang lain sebagai teman di media sosial, hanya jika anda mengenal mereka?

Tabel 3.30. Analisis Permasalahan dan Alternatif solusi yang telah dilakukan

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Tidak adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Diskominfo yang menangani urusan Persandian dan Keamanan Informasi yang menjabati jabatan fungsional Manggala Informatika maupun Sandiman	- Mengusulkan anjab ABK urusan persandian dan keamanan informasi ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan BKPSDMD Kota Cimahi untuk dibukakan jabatan fungsional Sandiman dan Manggala Informatika; - Mengirimkan/menugaskan staf dan struktural untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan sandiman yang dilaksanakan oleh BSSN; - Menginventarisir PIC TIK di setiap SKPD; dan - Mengusulkan ke Badan/perangkat daerah yang menangani kepegawaian terkait dengan kekurangan personil/kebutuhan personil dengan kualifikasi tertentu untuk menangani persandian, keamanan informasi dan pengembangan sumber daya telematika.
2.	Rendahnya pengetahuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Diskominfo pada khususnya dan Pemkot Cimahi pada umumnya terkait hak dan kewajiban tentang keamanan informasi yang berpotensi menimbulkan kesenjangan digital (tidak meratanya sarana dan prasarana digital)	- Meningkatkan literasi digital khusus mengenai persandian dan keamanan informasi dalam bentuk sharing secara maya informasi dan kegiatan; - Melaksanakan self assesment terkait tingkat kematangan keamanan informasi (Indeks KAMI) di setiap SKPD untuk diambil kebijakan terkait pemerataan sarana dan prasarana digital; - Mengadakan pendataan standar sarana keamanan informasi sesuai dengan tingkat kematangan keamanan informasi (Indeks KAMI); dan - Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengelola TIK di setiap SKPD dan pemangku kepentingan bidang persandian dan keamanan informasi.

3.	Tools yang dimanfaatkan untuk *Information Technology Security Assessment* (ITSA) dan Alat Pendukung (APU) belum maksimal.	- Peningkatan pengadaan tools ITSA dan APU; - Mengusulkan sarana dan prasarana persandian ke pihak terkait; dan - Mengajukan peminjaman sarana dan prasarana bila dirasa perlu dalam pelaksanaan kegiatan.
4.	Belum optimalnya Tim *Insiden Handling* Keamanan Informasi pada Diskominfo Pemerintah Daerah Kota Cimahi	- Melibatkan Pengelola TIK seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi; dan - Mendorong untuk diremsikan ke dalam bentuk *Computer Security Insident Response Team* (CSIRT) dengan payung hukum Peraturan Wali Kota.

e. Meningkatnya kinerja organisasi

Urusan pendukung pemerintahan didalamnya terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan untuk menunjang dan mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi agar berjalan efektif dan efisien. Urusan pendukung pemerintahan secara struktural diemban oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sekretariat pada suatu perangkat daerah merupakan struktur dalam organisasi yang menjalankan fungsi managemen sumber daya pada perangkat daerah melaui layanan internal atau supporting system, meliputi aspek perencanaa, pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum. Kinerja layanan internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 sangat baik hal ini dapat dilihat dari caiapan kinerja dari indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah, Indeks Profesionalitas ASN dan Nilai IKM Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi terlampaui seluruhnya.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Dalam mencapai sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 didukung oleh 5 Program, 13 Kegiatan dan 30 sub kegiatan, ke 5 program tersebut yaitu:

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Selaras dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi untuk melihat ketercapaian sasaran program tahun 2023 diukur menggunakan 7 (tujuh) indikator, berikut capaian sasaran program pada tahun 2023:

Tabel 3.31 Capaian Sasaran Program Tahun 2023

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2		3	7	9	10
I	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatkan penyelenggaraan e-Government	Tingkat kematangan teknologi informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	2,75	91	190%
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan komunikasi publik yang efektif dan efisien	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	60	100	166,67%
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya tata Kelola statistik sektoral daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	37	100	270,27%
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	33,33	100	300%

V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Sakip Perangkat Daerah	71	78,6	110,70
			Indeks Profesionalitas ASN	50	79,48	158,98
			Nilai IKM Perangkat Daerh	76,61	84,72	110,59

Capaian sasaran program Tahun 2023 seluruhnya melapaui target dengan rata-rata capaian sebesar 186,74% hal ini mengindikasikan bahwa capaian program mendukung capaian sasaran strategis dinas. Program-program yang dilaksanakan menjadi *critical success factor* bagi tercapainya sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Keterlibatan dan komitmen yang kuat dari pimpinan (pengambil kebijakan) dan pelaksana kebijakan dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan kebijakan anggaran serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.
2. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada dokumen perencanaan baik jangka menengah maupun jangka pendek.

Berikut tabel analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk tahun anggaran 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi:

Tabel 3.32 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	Sasaran	URAIAN	TARGET		REALISASI		PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN (%)
		PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
1	**Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**			**3,00 Indeks SPBE**		**4,02 Indeks SPBE**	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	**3.078.445.802**	**Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks 2,5)**	**2.968.791.766**	**Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks 4,75)**	**96,44%**
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**1.768.773.511**	**90 Persen perangkat daerah yang menggunakan domain cimahikota.go.id**	**1.700.404.690**	**90 Persen perangkat daerah yang menggunakan domain cimahikota.go.id**	**96,13%**
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.768.773.511	75 unit Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.700.404.690	75 unit Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	96,13%
		Kegiatan Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**1.309.672.291**	**85 persen aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah**	**1.268.387.076**	**85 persen aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah**	**96,85%**

		Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	256.976.650	1 Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	241.519.642	1 Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19,33%
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	431.528.437	1unit Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	430.827.838	1unit Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	99,84%
		Sub Kegiatan Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	61.573.000	1 Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	60.846.400	1 Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	98,82%
		Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	433.182.204	1 unit Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	426.178.205	4 unit Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	98,38%
		Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	126.412.000	1 Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	109.014.991	1 Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	86,24%
2	**Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik**			**80 Indeks Keterbukaan Infromasi Publik**		**90,48 Indeks Keterbukaan Infromasi Publik**	

		Program Informasi dan Komunikasi Publik	**2.278.917.450**	**60 Persen Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**2.159.908.910**	**60 Persen Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**94,78%**
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**2.278.917.450**	**82 persen analisis berita yang berkonten positif**	**2.159.908.910**	**82 persen analisis berita yang berkonten positif**	**94,78%**
		Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	136.900.000	12 Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	131.226.093	12 Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	95,86%
		Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	1.957.354.950	10 Layanan Hubungan Media	1.869.444.718	10 Layanan Hubungan Media	95,51%
		Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	184.662.500	12 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	159.238.099	12 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	86,23%
3	**Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas**			**2,00 Indeks Pembangunan Statistik**		**2,53 Indeks Pembangunan Statistik**	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**253.312.500**	**37 PersenPerangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data**	**243.457.771**	**100 PersenPerangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data**	**96,11%**

		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**253.312.500**	**200 Dataset ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data**	**243.457.771**	**830 Dataset ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data**	**96,11%**
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	226.124.000	20 Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	217.457.771	20 Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	96,17%
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	27.188.500	45 orang SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;	26.000.000	45 orang SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;	95,63%
4	**Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah**			**351 Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**		**409 Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	**406.280.000**	**33 Persen Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah**	**398.910.045**	**100 Persen Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah**	**98,19%**

		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**72.520.000**	**10 Persen titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;**	**72.059.425**	**15 Persen titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;**	**99,36%**
		Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72.520.000	1 Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	72.059.425	30 Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	99,36%
		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**333.760.000**	3 Persen ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	**326.850.620**	40 Persen ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	**97,93%**
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	103.500.000	1 Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	101.897.700	1 Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98,45%
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	230.260.000	15 Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	224.952.920	15 Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	97,70%
5	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah**			**55 Indeks Reformasi Birokrasi**		**78,71 Indeks Reformasi Birokrasi**	

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**7.035.105.843**	**71 Nilai Sakip Pemerintah Daerah**	**6.335.677.066**	**78,66 Nilai Sakip Pemerintah Daerah**	**90,06%**
				50 Indeks Profesionalitas ASN		**50 Persen ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi**	
				76,61 Nilai IKM Perangkat Daerah		**84,72 Nilai IKM Perangkat Daerah**	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**43.549.700**	**100 persen dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun**	**43.383.840**	**100 persen Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun**	**99,62%**
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.824.000	2 dokumenPerencanaan PD	23.559.840	2 dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan PD	118,85%
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.725.700	16 dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD	19.824.000	16 dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD	83,55%
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**16.085.000**	**75 persen penyelenggaraan administrasi barang milik daerah**	**15.409.895**	**100 persen Pesentase penyelenggaraan administrasi barang milik daerah**	**95,80%**
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.085.000	5 Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.409.895	5 Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	95,80%
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**393.403.900**	**12 Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;**	**372.322.093**	**12 Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;**	**94,64%**
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.901.000	40 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35.364.200	45 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	95,84%

		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.984.500	15 Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16.394.650	15 Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	78,13%
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.569.400	3 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	146.981.000	3 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	91,54%
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.949.000	50 laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.582.243	177 laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,22%
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**84.975.000**	**12 bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**83.808.447**	**6 bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**98,63%**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.540.000	16 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.007.352	16 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	98,65%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.000	16 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	627.251	16Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62,73%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.435.000	16 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44.173.844	16 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	99,41%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**302.980.890**	**12 bulan pemeliharaan barang milik daerah**	**295.558.031**	**12bulan pemeliharaan barang milik daerah**	**97,55%**

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.090.000	5 unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	108.506.600	5 unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96,80%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	166.060.890	1 Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	162.933.431	1 Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	98,12%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.830.000	15 unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24.118.000	15 unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	97,13%
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**88.047.000**	**100 persen Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian**	**83.947.000**	**100 persen Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian**	**95,34%**
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88.047.000	40 pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	83.947.000	45 pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	95,34%
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**6.106.064.353**	**12 Dokumen Keuangan Yang Disusun**	**5.441.247.760**	**12 Dokumen Keuangan Yang Disusun**	**89,11%**
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.090.081.053	34 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.425.339.060	34 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89,08%

		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.983.300	18 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.908.700	18 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99,53%
TOTAL			**13.052.061.595**		**12.106.745.558**		**92,76%**

3.1.7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berikut disampaikan analisis atas efiseinsi penggunaan sumberdaya pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi:

Tabel 3.33 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efiseinsi
1	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	134,00%	96,44%	3,56%
2	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	113,10%	94,78%	5,22%
3	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	126,50%	96,11%	3,89%
4	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	116,52%	98,19%	1,81%
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	143,11%	90,06%	9,94%
Total			**126,65%**	**92,76%**	**7,24%**

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2023 secara keseluruhan tercapai hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian indikator dari masing-masing sasaran strategis yang seluruhnya melebihi target yang telah ditentukan. Efiseinsi pada penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran Menigkatnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik sebesar 3,56%. dari pelaskanaan 1 progran, 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang mendukung sasaran ini anggaran yang digunakan/direalisasikan sebesar Rp. 2.968.791.766 (96,44%) terdapat efiseinsi anggaran sebesar Rp. 109.654.036 (3,56%).

Capaian kinerja saasran Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik sebesar 113,10% pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan anggaran

yang digunakan sebesar Rp. 2.159.908.910 (94,78%) terdapat efisiensi sebesar Rp. 119.008.540 (5,22%).

Capaian sasasran kinerja Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas diselenggarakan melalui 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan pada tahun anggaran ini realisasi anggaran sebesar Rp. 243.457.771 (96,11%) terdapat efisiensi sebesar Rp 119.008.540 (3,89%).

Sasaran Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah dilaksanakan melalui 1 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 398.910.045 (98,19%) terdapat efiseinsi sebsar RP. 7.369.955 (1,81%). Capaian sasaran terakhir yaitu merupakan urusan penunjang yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran lain yang berupakan core business dari Diskominfo yaitu sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan tercapai dengan capain kinerja sebesar 143,11%. capaian kinerja ini menggnakan anggaran sebesar Rp. 6.335.667.006 (90,06%) terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 699.428.777 (9,94%).

Secara keseluruhan rata-rata ketercapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tercapai dengan realisasi sebesar 126,65% capaian ini adalah Sangat Baik. Untuk mencapai kinerja tersebut dilaksanakanmelalui 5 program, 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.052.061.595 dan direalisasikan sebesr Rp. 12.106.745.558 (92,76%) dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 945.316.037 (7,24%).

3.1.8. Simpulan hasil analisis indikator kinerja

Merujuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi 2023-2026, tujuan dan sasaran strategis terdiri dari :

Dengan sasaran strategis sebagi berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik.
3. Terwujudnya Data Statistik Sektoral Daerah Yang Berkualitas.

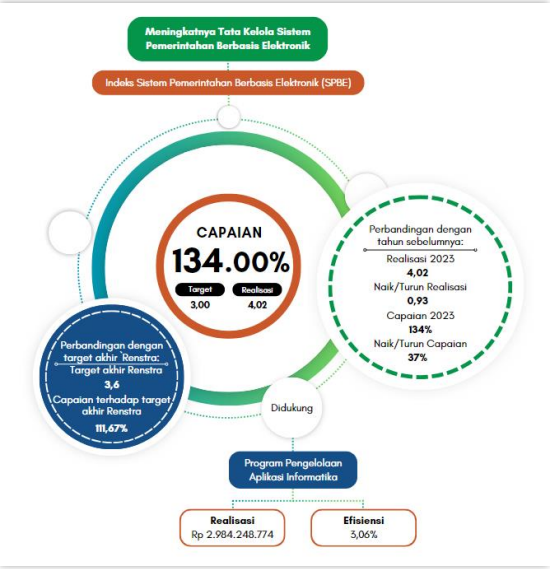
Untuk mengukur sasaran tersebut menggunakan indikator sebagi berikut:

1. Indikator SPBE.
2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
3. Indeks Pembangunan Statistik.
4. Indeks Keamanan Informasi.
5. Indeks Reformasi Birokrasi.

Melalui indikator tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan dengan membandingkan antara target pencapaian sasaran dengan realisasi kinerja.

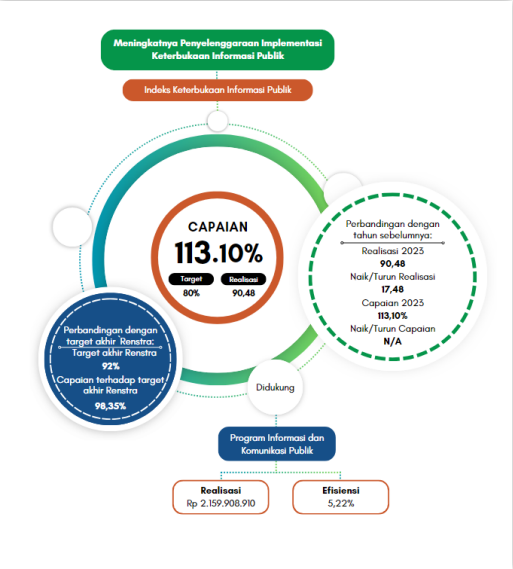
Capaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2023 **sangat baik,** dengan indikator Indeks SPBE dari target 3,00 terealisasi sebesar 4,02 sehingga capaian kinerja mencapai 134%, realisasinya meningkat 0,93 poin atau capaian kienerja meningkat 37% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja tercapai 111,67%. Efiseinsi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan sebesar 3,06%.

Gambar 3.16 Capaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



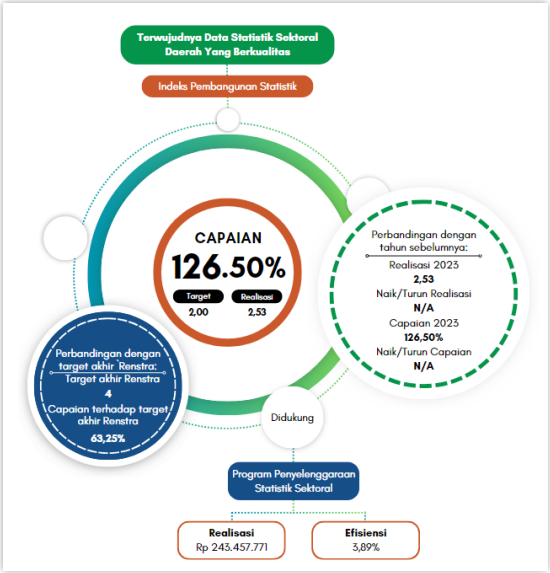
Capaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2023 **sangat baik,** dengan indikator Indeks SPBE dari target 3,00 terealisasi sebesar 4,02 sehingga capaian kinerja mencapai 134%, realisasinya meningkat 0,93 poin atau capaian kienerja meningkat 37% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja tercapai 111,67%. Efiseinsi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan sebesar 3,06%.

Gambar 3.17 Capaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



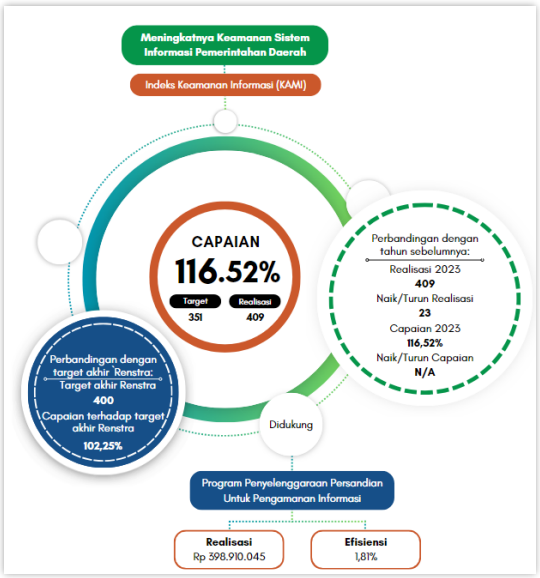
Capaian sasaran Terwujudnya Data Statistik Sektoral Daerah Yang Berkualitas pada tahun 2023 memperoleh predikat **sangat baik,** dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik dari target 2,00 terealisasi sebesar 2,53 sehingga capaian kinerja mencapai 126,50%, penilaian Indeks Pembangunan Statistik belun dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena penilian baru dilaksanakan pada tahun ini sehingga tidak ada base line untuk dibandingkan. Efiseinsi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan sebesar 3,89%.

Gambar 3.18 Capaian sasaran Terwujudnya Data Statistik Sektoral Daerah Yang Berkualitas pada tahun 2023



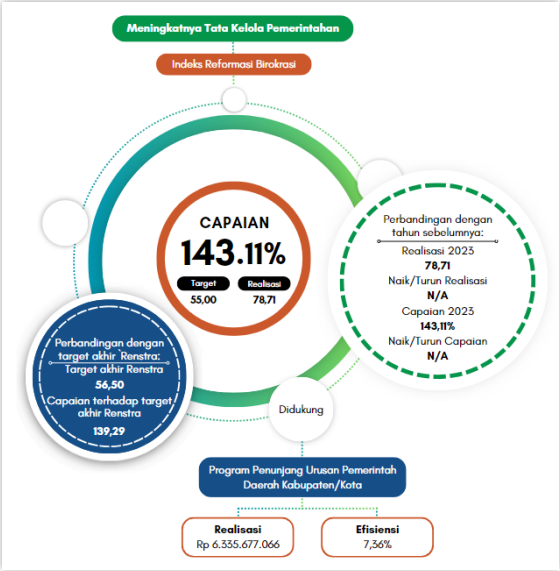
Capaian sasaran Meningkatnya Keamanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada tahun 2023 **sangat baik,** dengan indikator Indeks Keamanan Informasi dari target 351 terealisasi sebanyak 409 sehingga capaian kinerja mencapai 116%, realisasinya meningkat 23 poin. Efiseinsi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan sebesar 1,81%.

Gambar 3.19 Capaian sasaran Meningkatnya Keamanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah



Capaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah pada tahun 2023 **sangat baik,** dengan indikator Reformasi Birokrasi dari target 55,00 terealisasi sebesar 02 sehingga capaian kinerja mencapai 134%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja tercapai 139,29%. Efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan sebesar 3,06%.

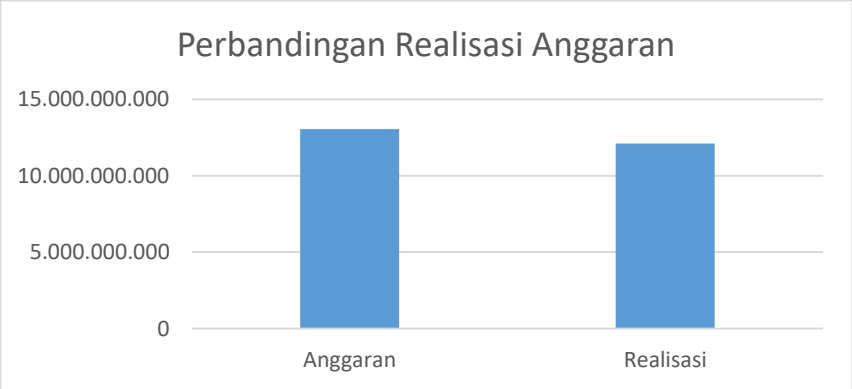
Gambar 3.20. Capaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah



3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tercapainya sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 sebesar Rp. 13.052.061.595. Anggaran terealisasi sebesar Rp. 12.106.745.558. atau sebesar 92,76%. Dapat digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 3.21 Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran



BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan media penyampaian pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyusunan LKIP ini merupakan salah satu upaya untuk menciptakan *Good Governance* dengan merujuk pada pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika memuat informasi tentang hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra serta Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022 dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja yang disusun secara objektif. Proses penyusunan laporan ini dilaksanakan melalui tahapan pengupulan data, pengolahan berupa evaluasi kinerja dan analisis, serta penyajian informasi yang akurat.

Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 berhasil mencapai kinerja rata-rata sangat baik. Lima sasaran strategis tercapai melebihi target. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis mencapai 126,65% dengan faktor pendorong utama keberhasilan diantaranya adalah adanya keterlibatan dan komitmen yang kuat dari pimpinan (pengambil kebijakan) dan pelaksana kebijakan dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan kebijakan anggaran serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi. Kerjasama dan dukungan dari semua pihak menjadi faktor keberhasilan yang tak kalah penting baik pihak internal maupun eksternal yang telah bersinergi terlibat dalam upaya melakukan perbaikan terus menerus terhadap sistem kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi. Keberhasilan ini perlu mendapatkan apresiasi bagi semua pihak yang terlibat.

Sumber daya keuangan yang berhasil dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian strategis pada tahun 2022 sebesar Rp. 13.052.061.595 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.106.745.558 (92,76%) dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 945.316.037 (7,24%).

Pada Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi memiliki peran strategis menjadi leading institution dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi general melalui Tingkat Implementasi SPBE, Implemntasi SPBE diukur melalui Indeks SPBE, Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR), Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diukur melalui Indes Pembangunan Statistik. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika ikut serta secara aktif terutama dalam aspek tata kelola pemerintahan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi Tematik.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Adapun saran dan rekomendasi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang yaitu:

1. Memperkuat koordinasi baik eksternal meupun internal.
2. Melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan penganggaran agar pencapaian sasaran kinerja bisa dicapai dengan lebih efektif dan efisien.
3. LKIP yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja bagi Pemerintah Kota Cimahi khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika serta dijadikan sebagai dasar bagi perbaikan kinerja.

4. Melakukan penyesuaian dan perbaikan terget kinerja untuk tahun berikutnya terhadap target sasaran setrategis yang sudah melampaui/melebihi target di tahun 2023.

L A M P I R A N

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.**
Jabatan : Pj. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2023

Pihak Kedua,
Pj. WALI KOTA CIMAHI,

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI,

HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720301 199203 1 012

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,00 Indeks
2	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Infromasi Publik	80 Persen
3	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	2 Level
4	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351 Nilai
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55 Nilai

	Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	7.035.105.843,00
2.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp	2.278.917.450,00
3.	Program Aplikasi Informatika	Rp	3.078.445.802,00
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	253.312.500,00
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	406.280.000,00
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**13.052.061.595,00**

Cimahi, November 2023

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI,

HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720301 199203 1 012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HENDI PURWANDA, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN STATISTIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

	Cimahi, November 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN STATISTIK
HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.	**HENDI PURWANDA, S.Sos**
Pembina Utama Muda	Penata Tingkat I
NIP. 197203011992031012	NIP. 197902032005011010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI
KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK
ESELON III

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan komunikasi publik yang efektif dan efisien	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60 Persen
2	Meningkatnya tata kelola statistik sektoral daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	37 Persen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Meningkatnya kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat	Persentase analisis berita yang berkonten positif	82
2.1	Tersedianya Data Statistik Daerah yang berkualitas	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	250 Data Set

Program	Anggaran
1 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.278.917.450
2 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	253.312.500
Rp	**2.532.229.950**

Kegiatan	Anggaran
1.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.278.917.450
2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	253.312.500

Cimahi, November 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203011992031012

KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN STATISTIK

HENDI PURWANDA, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19790203200501101O

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SEKSI DATA DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AZIS SUMARYONO, S.Kom., M.Kom
Jabatan : KEPALA SEKSI DATA DAN STATISTIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDI PURWANDA, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN STATISTIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2023

KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN STATISTIK	KEPALA SEKSI DATA DAN STATISTIK
HENDI PURWANDA, S.Sos	**AZIS SUMARYONO, S.Kom., M.Kom**
Penata Tingkat I	Pembina
NIP. 197902032005011010	NIP. 197506022006041001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI
ESELON IV
KEPALA SEKSI DATA DAN STATISTIK

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya aktivitas pengumpulan data statistik sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	20 Dokumen
2	Meningkatnya kualitas SDM pengelola data/statistik/informasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	45 Orang

	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	226.124.000
2	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	27.188.500
	Rp	**253.312.500**

Cimahi, November 2023

KEPALA BIDANG INFORMASI,
KOMUNIKASI PUBLIK, DAN STATISTIK

HENDI PURWANDA, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 197902032005011010

KEPALA SEKSI DATA DAN STATISTIK

AZIS SUMARYONO, S.Kom., M.Kom
Pembina
NIP. 197506022006041001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SRI KURNIAWATI, S.Sos
Jabatan : PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDI PURWANDA, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN STATISTIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2023

KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN STATISTIK

HENDI PURWANDA, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 197902032005011010

PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI

SRI KURNIAWATI, S.Sos
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198705272008122001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI
PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat	Jumlah Layanan Hubungan Media	10 Layanan

	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	1.957.354.950
	Rp	**1.957.354.950**

Cimahi, November 2023

KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN STATISTIK

HENDI PURWANDA, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 197902032005011010

PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI

SRI KURNIAWATI, S.Sos
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198705272008122001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

ANALIS BERITA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADHY RAHADHYAN, S.I.Kom.
Jabatan : ANALIS BERITA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDI PURWANDA, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN STATISTIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2023

KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN STATISTIK	ANALIS BERITA
HENDI PURWANDA, S.Sos	**ADHY RAHADHYAN, S.I.Kom.**
Penata Tingkat I	Penata Muda
NIP. 197902032005011010	NIP. 199405272018011002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI
ANALIS BERITA

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya layanan informasi dan pengaduan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen
2	Terlaksananya publikasi prenyelenggaraan pemerintahan daerah melalui berbagai media	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen

	Sub Kegiatan		Anggaran
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		184.662.500
2	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		136.900.000
		Rp	**321.562.500**

Cimahi, November 2023

KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN STATISTIK

HENDI PURWANDA, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 197902032005011010

ANALIS BERITA

ADHY RAHADHYAN, S.I.Kom.
Penata Muda
NIP. 199405272018011002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BAMBANG SUPRIYADI, ST., MT
Jabatan : KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DAN PERSANDIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DAN PERSANDIAN
HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.	**BAMBANG SUPRIYADI, ST., MT**
Pembina Utama Muda	Pembina
NIP. 197203011992031012	NIP. 197305082005011005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI
KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DAN PERSANDIAN
ESELON III

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyelenggaraan e-government	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	2,5 Nilai Indeks
2	Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	33,33 Persen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Terlaksananya penyelenggaraan domain dan sub-domain Pemerintah Kota Cimahi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	90 Persen
1.2	Meningkatnya layanan TIK Pemerintah Kota Cimahi	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	85 Persen
2.1	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota Cimahi	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	3 Persen
2.2	Terselenggaranya pola hubungan komunikasi sandi antara PD Kota Cimahi	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan	10 Persen

	Program	Anggaran
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.078.445.802
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	406.280.000
	Rp	**3.484.725.802,00**

Kegiatan		Anggaran
1.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.768.773.511
1.2	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.309.672.291
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	333.760.000
2.2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	72.520.000

Cimahi, November 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203011992031012

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DAN PERSANDIAN

BAMBANG SUPRIYADI, ST., MT
Pembina
NIP. 197305082005011005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HADIYANTO, ST
Jabatan : PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAMBANG SUPRIYADI, ST., MT
Jabatan : KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DAN PERSANDIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2023
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA



HADIYANTO, ST
Penata Tingkat I
NIP. 197809052010011009

KEPALA BIDANG
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DAN PERSANDIAN



BAMBANG SUPRIYADI, ST., MT
Pembina
NIP. 197305082005011005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI
SUB KOORDINATOR
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit
2	Terlaksananya pengembangan sistem yang memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan
3	Terlaksananya pengembangan Cimahi Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan	1 Dokumen

Sub Kegiatan		Anggaran
1 Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan		433.182.204
2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		61.573.000
3 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		126.412.000
	Rp	**621.167.204**

Cimahi, November 2023

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DAN PERSANDIAN

BAMBANG SUPRIYADI, ST., MT
Pembina
NIP. 197305082005011005

PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA

HADIYANTO, ST
Penata Tingkat I
NIP. 197809052010011009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IRWAN NUGRAHA MANSYUR, SAP., MM
Jabatan : PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAMBANG SUPRIYADI, ST., MT
Jabatan : KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DAN PERSANDIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2023

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DAN PERSANDIAN	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
BAMBANG SUPRIYADI, ST., MT	**IRWAN NUGRAHA MANSYUR, SAP., MM**
Pembina	Penata Tingkat I
NIP. 197305082005011005	NIP. 197605142005011007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI
SUB KOORDINATOR
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya layanan jaringan intra Pemerintah Kota Cimahi	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	75 Unit
2	Terlaksananya penatalaksanaan e-government Pemerintah Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
3	Terlaksananya pengelolaan pusat data Pemerintah Kota Cimahi	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit

	Sub Kegiatan		Anggaran
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		1.768.773.511
2	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		256.976.650
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		431.528.437
		Rp	**2.457.278.598**

Cimahi, November 2023

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DAN PERSANDIAN

BAMBANG SUPRIYADI, ST., MT
Pembina
NIP. 197305082005011005

PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA

IRWAN NUGRAHA MANSYUR, SAP., MM
Penata Tingkat I
NIP. 197605142005011007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PERSANDIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TELEMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DENI PRAYITNO, S.Kom., MT
Jabatan : KEPALA SEKSI PERSANDIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TELEMATIKA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAMBANG SUPRIYADI, ST., MT
Jabatan : KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DAN PERSANDIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2023

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DAN PERSANDIAN	KEPALA SEKSI PERSANDIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TELEMATIKA
BAMBANG SUPRIYADI, ST., MT	**DENI PRAYITNO, S.Kom., MT**
Pembina	Penata Tingkat I
NIP. 197305082005011005	NIP. 198802232010011002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI
ESELON IV
KEPALA SEKSI PERSANDIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TELEMATIKA

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Kota Cimahi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan
2	Terlaksananya layanan keamanan informasi Pemerintah Kota Cimahi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15 Perangkat Daerah
3	Terlaksananya penggunaan komunikasi sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah

	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	103.500.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	230.260.000
3	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72.520.000
	Rp	**406.280.000**

Cimahi, November 2023

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DAN PERSANDIAN

BAMBANG SUPRIYADI, ST., MT
Pembina
NIP. 197305082005011005

KEPALA SEKSI PERSANDIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TELEMATIKA

DENI PRAYITNO, S.Kom., MT
Penata Tingkat I
NIP. 198802232010011002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

SEKRETARIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra. YULIA FITRI MULYATI, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SEKRETARIS
HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.	**Dra. YULIA FITRI MULYATI, M.Si**
Pembina Utama Muda	Pembina Tingkat I
NIP. 197203011992031012	NIP. 196601231994032007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI
SEKRETARIS
ESELON III

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	71 (BB) Nilai Angka
		Indeks Profesionalitas ASN	50 Persen
		Nilai IKM Perangkat Daerah	76,61 Nilai Angka

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	1 Persen
1.2	Meningkatnya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah;	12 Bulan
1.3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan
1.4	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan
1.5	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas barang milik daerah penunjang urusan	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan
1.6	Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	100 Persen
1.7	Terlaksananya administrasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	12 Dokumen

	Program		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		6.929.738.843
		Rp	**6.929.738.843**

Kegiatan		Anggaran
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.549.700
1.2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.085.000
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.403.900
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.975.000
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.060.890
1.6	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.600.000
1.7	Kegiatan Administrasi Keuangan	6.106.064.353
	Jumlah	**6.929.738.843**

Cimahi, November 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203011992031012

SEKRETARIS

Dra. YULIA FITRI MULYATI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196601231994032007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JAMILA, S.STP
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. YULIA FITRI MULYATI, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2023

SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dra. YULIA FITRI MULYATI, M.Si	**JAMILA, S.STP**
Pembina Tingkat I	Penata Tingkat I
NIP. 196601231994032007	NIP. 197811141997122002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI
ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen
2	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket
3	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket
4	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
5	Terfasilitasinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan
6	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 Laporan
7	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16 Laporan
8	Tersedianya layanan yang memenuhi kebutuhan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan
9	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
10	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
11	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit
12	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang

	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.085.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.901.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.984.500
4	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.569.400
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.949.000
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.975.000
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.000
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.435.000
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.060.890
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.450.000
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.550.000
12	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.600.000
	Rp	**936.559.790**

Cimahi, November 2023

SEKRETARIS

Dra. YULIA FITRI MULYATI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196601231994032007

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

JAMILA, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 197811141997122002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ISSABELLA CECILIA, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. YULIA FITRI MULYATI, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2023

SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
Dra. YULIA FITRI MULYATI, M.Si	**ISSABELLA CECILIA, S.E., M.M.**
Pembina Tingkat I	Pembina
NIP. 196601231994032007	NIP. 198210012006042014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terfasilitasinya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang
2	Terlaksanannya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 Dokumen

	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.090.081.053
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.983.300
	Rp	**6.106.064.353**

Cimahi, November 2023

SEKRETARIS

Dra. YULIA FITRI MULYATI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196601231994032007

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

ISSABELLA CECILIA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 198210012006042014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

PERENCANA AHLI MUDA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YUDI SUPRIADI, S.Sos
Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. YULIA FITRI MULYATI, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2023

SEKRETARIS	PERENCANA AHLI MUDA
Dra. YULIA FITRI MULYATI, M.Si	**YUDI SUPRIADI, S.Sos**
Pembina Tingkat I	Penata Muda Tingkat I
NIP. 196601231994032007	NIP. 197602172010011004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI
SUB KOORDINATOR
PERENCANA AHLI MUDA

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen
2	Terlaksananya pgendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan lingkup Dinas	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 Laporan

	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.725.700
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.824.000
	Rp	**43.549.700**

Cimahi, November 2023

SEKRETARIS

Dra. YULIA FITRI MULYATI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196601231994032007

PERENCANA AHLI MUDA

YUDI SUPRIADI, S.Sos
Penata Muda Tingkat I
NIP. 197802172010011004

panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN
HASIL EVALUASI SPBE
2023

PEMERINTAH KOTA CIMAHI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE





EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

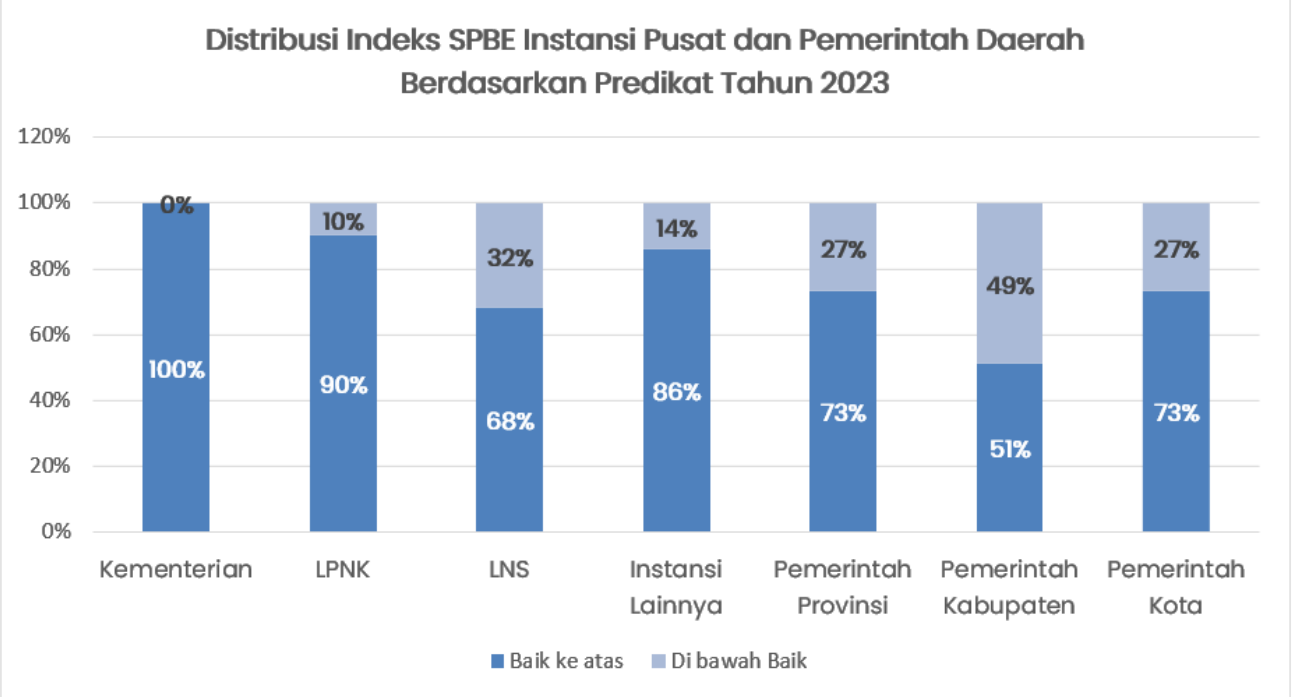
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	**2,79**	**3,66**	**3,40**	**2,95**	**3,01**	**2,59**	**2,50**
Domain Kebijakan	**2,91**	**3,63**	**3,47**	**3,06**	**3,17**	**2,72**	**3,20**
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	**2,27**	**3,42**	**3,02**	**2,66**	**2,56**	**2,01**	**2,54**
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	**1,65**	**2,53**	**2,31**	**1,98**	**1,81**	**1,45**	**1,82**
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	**3,45**	**4,21**	**3,99**	**3,43**	**3,64**	**3,28**	**3,67**
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

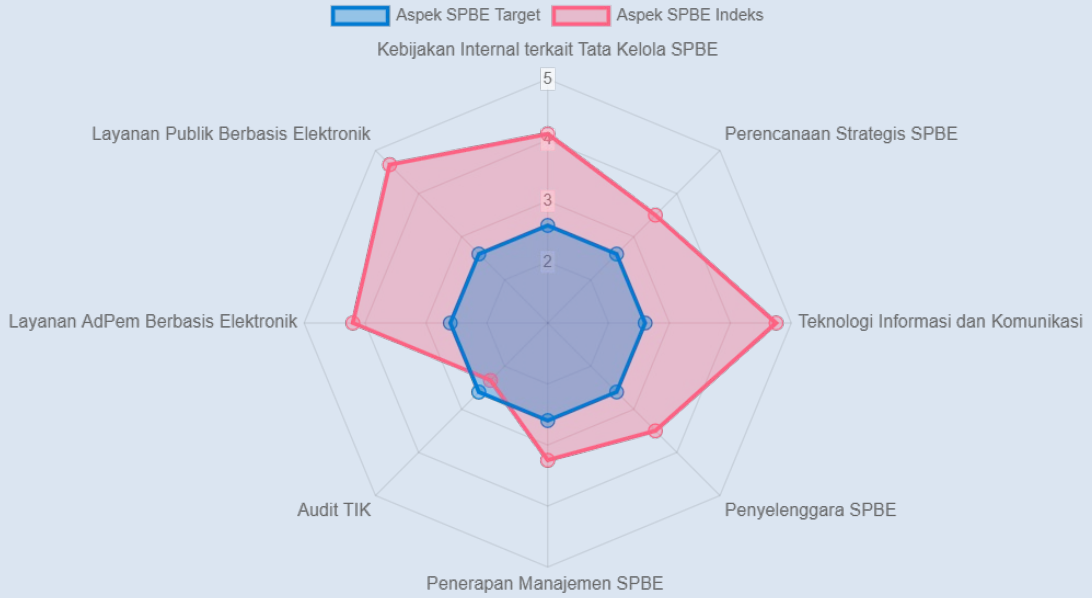


INDEKS SPBE – PEMERINTAH KOTA CIMAHI

4,02

(Sangat Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	**4,02**
Domain Kebijakan SPBE	4,10
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*4,10*
Domain Tata Kelola SPBE	4,00
Perencanaan Strategis SPBE	*3,50*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*4,75*
Penyelenggara SPBE	*3,50*
Domain Manajemen SPBE	3,00
Penerapan Manajemen SPBE	*3,25*
Audit TIK	*2,33*
Domain Layanan SPBE	4,38
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*4,20*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*4,67*

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Seluruh aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Cimahi. Tidak sekedar pemenuhan saja, akan tetapi seluruh pemenuhannya sudah diatas standar. Dan dengan satu kebijakan internalnya sudah maksimum yaitu pada kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE.

- Kekuatan
  Kesemua aspek kebijakan internal merupakan kekuatan bagi Pemerintah Kota Cimahi.
- Kelemahan
  Tidak terdapat kelemahan Pemerintah Kota Cimahi dalam aspek kebijakan Internal Tata Kelola SPBE.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Seluruh isi dari aspek Perencanaan Strategis SPBE sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Cimahi. Dimana tingkat kematangan perencanaan dan anggaran dan inovasi proses bisnis sudah sesuai standar karena muatannya sudah lengkap. Sementara untuk Arsitektur SPBE dan Peta Rencana sudah diatas standar karena sudah dilakukan evaluasi.

- Kekuatan
  Kekuatan dalam aspek ini dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Cimahi terdapat pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana.
- Kelemahan
  Tidak ada kelemahan untuk aspek perencanaan strategis yang bisa menjadi hambatan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Cimahi.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aspek Teknologi Informasi dan Komunikas SPBE pada Pemerintah Kota Cimahi sudah terpenuhi 100%. Bahkan 75% indikatornya sudah menunjukkan tingkat kematangan maksimal. Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, dan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah mempunyai tingkat kematangan maksimal standar karena sudah dilakukan evaluasi secara periodik dan dilakukan tindak lanjut setelah evaluasi. Sedangkan Sistem Penghubung Layanan sudah dilakukan evaluasi akan tetapi belum ada tindak lanjut.

- Kekuatan
  Kekuatan Pemerintah Kota Cimahi pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah pada Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, dan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Ketiga aspek ini sangat penting sebagai insfrastruktur pendukung penyelenggaraan SPBE terutama pada layanan-layanan aplikasi.
- Kelemahan
  Tidak ada kelemahan untuk aspek teknologi informasi dan komunikasi yang bisa menjadi hambatan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Cimahi.

D. Penyelenggara SPBE

Aspek Penyelenggara SPBE pada Pemerintah Kota Cimahi telah terpenuhi 100%. Sudah terdapat tim koordinasi SPBE yeng dibentuk secara resmi dan beranggotakan seluruh perwakilan satuan kerja. Rencana kerja tim sudah ada dan sudah dilaksanakan seluruhnya dan sudah dilakukan evaluasi. Untuk Kolaborasi SPBE telah diadakan kolaborasi penerapan SPBE yang dilakukan dalam suatu kegiatan bersama termasuk juga kegiatan dengan instansi eksternal akan tetapi belum meperlihatkan adanya kolaborasi pada seluruh Unit Kerja.

- Kekuatan
  Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE merupakan kekuatan dari Pemerintah Kota Cimahi dalam melaksanakan SPBE.
- Kelemahan
  Tidak ada kelemahan untuk aspek Penyelenggara SPBE yang bisa menjadi hambatan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Cimahi.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan aspek Penerapan Manajemen SPBE yang telah dipenuhi 100%. Dan 6 dari ke 8 aspek penerapan manajemen sudah berada pada tingkat kematangan standar atau lebih tinggi dari standar. sedangnya 2 aspek lainnya masih dibawah standar. Adapun yang sudah pada tingkat standar atau diatas standar adalah Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen

SDM, dan manajemen Layanan SPBE. Untuk manajemen Data sudah mencapai nilai maksimal. Sedangkan yang masih kurang adalah Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan.?

- Kekuatan
  Terdapat dua manajemen yang menjadi kekuatan Pemerintah Kota Cimahi yaitu Manajemen Data dan Manajemen Keamanan Informasi.
- Kelemahan
  Terdapat 2 manajemen yang menjadi kelemahan Pemerintah Kota Cimahi dalam penyelenggaraan SPBE, yaitu : Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan.

F. Audit TIK

Pemenuhan aspek Audit TIK di Pemerintah Kota Cimahi sudah 100% . Satu dari tiga indikator dalam aspek ini, yaitu audit kemananan informasi sudah mempunyai tingkat kematangan standar karena sudah dilakukan oleh BSSN. Sementara dua lainnya yaitu audit Infrastruktur dan audit Aplikasi belum menggunakan standar BRIN, sehingga masih dibawah nilai standar.

- Kekuatan
  Tidak ada kekuatan Audit TIK dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Cimahi.
- Kelemahan
  Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi menjadi kelemahan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Cimahi.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan, sudah 100% pelaksanaan layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Cimahi telah terpenuhi. Tidak hanya terpenuhi akan tetapi 80% nya layanannya sudah mempunyai tingkat kematangan diatas standar dan 40% layanannya sudah mempunyai nilai maksimal. Layanan-layanan yang sudah maksimal adalah layanan yang menggunakan aplikasi umum yang sudah ditambahi dengan SOP-SOP ataupun dengan penambahan aplikasi untuk kelancaran pelaksanaannya. yaitu layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan yang menggunakan SIPD, dan Layanan Kepegawaian. Layanan yang sudah diatas standar tetapi belum maksimal adalah Layanan pengadaan Barang dan Jasa yang menggunakan SPSE, dan layanan Kearsipan Dinamis yang menggunakan Srikandi, layanan pengelolaan barang milik daerah yang menggunakan SIPKD Aset dan SIARKABEH , dan Layanan Kinerja Pegawai yang menggunakan SIKONCI. Sisanya 2 layanan yang masih di nilai standar adalah Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

- Kekuatan
  Layanan yang menggunakan aplikasi umum dari pusat dan layanan yang menggunakan aplikasi sendiri tapi sudah mengalami update merupakan layanan yang menjadi kekuatan Pemerintah Kota Cimahi dalam menyelenggarakan SPBE. Layanan-layanan tersebut adalah : Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kearsipan Dinamis, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Kepegawaian.
- Kelemahan
  Tidak ada kelemahan dalam aspek layanan Administasi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Cimahi.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pemenuhan aspek layanan Publik Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Cimahi sudah 100%. Tidak hanya terpenuhi, 100% layanan sudah memberikan kematangan diatas standar dan 66% nya sudah memberikan kematangan maksimal. layanan-layanan dengan kematangan maksimal adalah layananan JDIH dan 3 layanan publik sektor dengan aplikasinya SIAK, SIPINTER, dan SIKS. Sedang sebagiannya lagi juga sudah diatas standar yaitu layanan pengaduan publik yang menggunakan SP4N Lapor, layanan data terbuka yang menggunakan opendata Cimahi.

- Kekuatan
  Seluruh layanan Publik Berbasis Elektronik menjadi kekuatan dari Pemerintah Kota Cimahi dalam penyelenggaraan SPBE.
- Kelemahan
  Tidak terdapat kelemahan layanan publik berbasis elektronik pada Pemerintah Kota CImahi.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Pemerintah Kota Cimahi. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kota Cimahi menggambarkan predikat "Sangat Baik" dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi adalah pada aspek-aspek : Aspek 01 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE , Aspek 02 Perencanaan Strategis SPBE, Aspek 03 Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek 04 Penyelenggara SPBE, Aspek 07 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek 08 Layanan Publik Berbasis Elektronik. Pada ke enam aspek tersebut secara umum tidak ada kelemahan pada indikator-indikatornya. Sedangkan kelemahan berada pada Aspek 05 Penerapan Manajemen SPBE yaitu Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan, dan Aspek 06 Audit TIK yaitu pada Audit Infrastruktut dan Audit Aplikasi. Untuk meningkatkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Pemerintah Kota Cimahi dapat dengan memenuhi indikator-indikator yang masih menjadi kelemahan. Untuk menajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan dapat dilakukan pembuatan SOP tentang pelaksanaan yang sudah dilakukan, kemudian implementasi aplikasinya perlu untuk dipakai oleh seluruh unit kerja. Untuk Audit Infrastruktu dan Audit Aplikasi, dapat menghubungi BRIN untuk kemudian menyelenggarakan audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi yang sesuai standar. Selain menaikkan kelemahan-kelemahan diatas, perlu juga mulai dilakukan evaluasi terhadap indikator-indikator yang sudah mempunyai nilai standar. Buat notulen yang jelas dan spesific menyangkut indikator yang terkait. Untuk kemudian dapat dilakukan tindak lanjut. Diharapkan dengan melakukan hal-hal tersebut diatas, tingkat kematangan bisa semakin naik menuju predikat 'Memuaskan'.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	5
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	4
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	4
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	5
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	4
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	5
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT
Nomor 6 Tahun 2023

Tentang

HASIL MONITORING, EVALUASI DAN PEMERINGKATAN PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2023

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang:

a. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan standar petunjuk teknis standar layanan informasi publik;

b. Bahwa sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik diperlukan kualifikasi yang dijadikan tolak ukur;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tentang Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Di Jawa Barat Tahun 2023.

Mengingat:

a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

b. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;

e. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Seri E).

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Atas Laporan Hasil Tim Penilai Independen tentang Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023.

KEDUA : Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2023 dibagi dalam Beberapa Kategori Badan Publik sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Bahwa hasil keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 November 2023

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Ketua,



Dr. H. Ijang Faisal, M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 6
TAHUN : 2023
TENTANG : HASIL MONITORING, EVALUASI, DAN PEMERINGKATAN PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2023

A. Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Jawa Barat

No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score	Kualifikasi
1	Pemerintah Kabupaten Sumedang	79,68	20	99,68	INFORMATIF
2	Pemerintah Kota Bandung	77,92	20	97,92	INFORMATIF
3	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	78,16	19,66	97,82	INFORMATIF
4	Pemerintah Kabupaten Bandung	79,52	17,5	97,02	INFORMATIF
5	Pemerintah Kabupaten Karawang	77,76	17,5	95,26	INFORMATIF
6	Pemerintah Kabupaten Kuningan	76,72	17,5	94,22	INFORMATIF
7	Pemerintah Kota Bekasi	74,32	19,82	94,14	INFORMATIF
8	Pemerintah Kota Depok	75,36	17,82	93,18	INFORMATIF
9	Pemerintah Kabupaten Bogor	75,28	17,5	92,78	INFORMATIF
10	Pemerintah Kota Banjar	73,4	17,66	91,06	INFORMATIF
11	Pemerintah Kota Sukabumi	70,96	20	90,96	INFORMATIF
12	Pemerintah Kabupaten Cirebon	73,92	17	90,92	INFORMATIF

13	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	73,32	17,5	90,82	INFORMATIF
14	Pemerintah Kabupaten Subang	72,56	18	90,56	INFORMATIF
15	Pemerintah Kota Cirebon	70,8	19,7	90,5	INFORMATIF
16	Pemerintah Kota Cimahi	72,48	18	90,48	INFORMATIF
17	Pemerintah Kota Tasikmalaya	72,48	17,66	90,14	INFORMATIF
18	Pemerintah Kabupaten Garut	68,72	18,5	87,22	MENUJU INFORMATIF
19	Pemerintah Kota Bogor	66,4	20	86,4	MENUJU INFORMATIF
20	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	69,28	16,5	85,78	MENUJU INFORMATIF
21	Pemerintah Kabupaten Bekasi	63,6	18	81,6	MENUJU INFORMATIF
22	Pemerintah Kabupaten Majalengka	65,68	14,32	80	MENUJU INFORMATIF
23	Pemerintah Kabupaten Ciamis	52,2	18	70,2	CUKUP INFORMATIF
24	Pemerintah Kabupaten Indramayu	55,64	14,32	69,96	CUKUP INFORMATIF
25	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	51,68	13	64,68	CUKUP INFORMATIF
26	Pemerintah Kabupaten Cianjur	44,96	15,16	60,12	CUKUP INFORMATIF
27	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	17,76	13	30,76	TIDAK INFORMATIF

B. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat

No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score	Kualifikasi
1	Dinas Kesehatan	79,84	20	99,84	INFORMATIF
2	Badan Pendapatan Daerah	79,36	20	99,36	INFORMATIF
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	78,36	20	98,36	INFORMATIF
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	80	18,32	98,32	INFORMATIF
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	77,6	18,82	96,42	INFORMATIF
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	75,68	20	95,68	INFORMATIF
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	74,56	20	94,56	INFORMATIF
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	73,52	19,66	93,18	INFORMATIF
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	73,36	19,5	92,86	INFORMATIF
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	72,88	19,5	92,38	INFORMATIF
11	Dinas Perhubungan	77,44	14,32	91,76	INFORMATIF
12	Inspektorat Daerah	72,32	19,32	91,64	INFORMATIF
13	Dinas Pendidikan	71,68	19,66	91,34	INFORMATIF
14	Dinas Kehutanan	71,28	20	91,28	INFORMATIF
15	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat	71,04	20	91,04	INFORMATIF
16	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat	76,16	14,82	90,98	INFORMATIF
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	72,8	18	90,8	INFORMATIF
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	70,72	20	90,72	INFORMATIF

19	Badan Penghubung	70,56	20	90,56	INFORMATIF
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	73,08	17,32	90,4	INFORMATIF
21	Dinas Sosial	70,32	20	90,32	INFORMATIF
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	75,72	14,4	90,12	INFORMATIF
23	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Jawa Barat	71,68	18,4	90,08	INFORMATIF
24	Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan	68,08	19,66	87,74	MENUJU INFORMATIF
25	Satuan Polisi Pamong Praja	68,16	17	85,16	MENUJU INFORMATIF
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70,32	13	83,32	MENUJU INFORMATIF
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	64,56	18,16	82,72	MENUJU INFORMATIF
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	63,44	17,66	81,1	MENUJU INFORMATIF
29	Dinas Perkebunan	64,72	13,5	78,22	CUKUP INFORMATIF
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	58,16	19,66	77,82	CUKUP INFORMATIF
31	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	55,4	19,5	74,9	CUKUP INFORMATIF
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	57,72	15,82	73,54	CUKUP INFORMATIF
33	Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat	53,44	15,66	69,1	CUKUP INFORMATIF

34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	53,76	14	67,76	CUKUP INFORMATIF
35	Badan Kepegawaian Daerah	48,64	18,5	67,14	CUKUP INFORMATIF
36	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	40,92	18,82	59,74	KURANG INFORMATIF
37	Dinas Lingkungan Hidup	42,12	10,32	52,44	KURANG INFORMATIF
38	Dinas Perumahan dan Permukiman	19,16	18,16	37,32	TIDAK INFORMATIF
39	Dinas Sumber Daya Air	22,64	12,82	35,46	TIDAK INFORMATIF
40	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	0	19,32	19,32	TIDAK INFORMATIF

C. Kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Se-Jawa Barat

No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score	Kualifikasi
1	PT. Tirta Gemah Ripah	74,16	17,72	91,88	INFORMATIF
2	PT. Bank Jabar Banten	71,64	19,5	91,14	INFORMATIF
3	PD. Jasa dan Kepariwisataan	70,72	20	90,72	INFORMATIF
4	PT. Migas Utama Jabar (Perseroda)	32	16,4	48,4	KURANG INFORMATIF
5	PT. Agro Jabar	25,64	17,9	43,54	KURANG INFORMATIF
6	PT. Agronesia	18,44	15,22	33,66	TIDAK INFORMATIF
7	PT. Jasa Sarana Jawa Barat	18	14,4	32,4	TIDAK INFORMATIF
8	PT. Jamkrida Jabar	7,96	16, 5	24,46	TIDAK INFORMATIF
9	PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB)	4,64	19,5	24,14	TIDAK INFORMATIF

D. Kategori Instansi Vertikal Se-Jawa Barat

No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score	Kualifikasi
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat	79,2	20	99,2	INFORMATIF
2	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	78,88	20	98,88	INFORMATIF
3	Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat	78,32	20	98,32	INFORMATIF
4	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat	72,48	20	92,48	INFORMATIF
5	Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung	71,12	20	91,12	INFORMATIF
6	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat	70,64	19,82	90,46	INFORMATIF
7	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat	70,56	19,6	90,16	INFORMATIF
8	BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat	70,52	19,6	90,12	INFORMATIF
9	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat	46,48	14	60,48	CUKUP INFORMATIF
10	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat	44,28	14	58,28	KURANG INFORMATIF
11	Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat	23,24	14	37,24	TIDAK INFORMATIF
12	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat	19,32	14	33,32	TIDAK INFORMATIF

13	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat	12,96	14	26,96	TIDAK INFORMATIF
14	Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat	5,6	14	19,6	TIDAK INFORMATIF
15	Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat	3,04	14	17,04	TIDAK INFORMATIF
16	Kwarda dan Pramuka Jawa Barat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
17	Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
18	Kantor Wilayah Bea dan Cukai	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
19	Pengadilan Tinggi Jawa Barat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
20	KODAM III Siliwangi	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
21	Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Jawa Barat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
22	Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF

E. Kategori Partai Politik Se-Jawa Barat

No	Badan Publik	Nilai Monitoring	Kualifikasi
1	DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat	96,80	INFORMATIF
2	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jawa Barat	96,54	INFORMATIF
3	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Barat	95	INFORMATIF

4	DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat	94,81	INFORMATIF
5	DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat	93,63	INFORMATIF
6	DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Jawa Barat	93,1	INFORMATIF
7	DPD Partai Demokrat Jawa Barat	93	INFORMATIF
8	DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat	92,7	INFORMATIF
9	DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat	92,35	INFORMATIF
10	DPW Partai Perrsatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat	90	INFORMATIF

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Ketua,



Dr. H. Ijang Faisal, M.Si.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-386.pj/01000/ES/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Jakarta, 6 November 2023

Yth. Walikota Cimahi
di -
Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengatur bahwa kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, Badan Pusat Statistik sebagai pembina data statistik telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 di Pemerintah Kota Cimahi dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023 adalah **2,53** dengan predikat **"Cukup"**. Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan pada Lampiran.

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan penguatan Sistem Statistik Nasional. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Amalia Adininggar Widyasanti

Tembusan:
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Menteri Dalam Negeri

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710, Kotak Pos 1003, Jakarta 10010, Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax (021) 3857046, Homepage: http://www.bps.go.id E-mail: bpshq@bps.go.id

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Lampiran Surat Kepala Badan Pusat Statistik
Nomor : B-386.pj/01000/ES/11/2023
Tanggal : 6 November 2023

Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2023

PEMERINTAH KOTA CIMAHI



BADAN PUSAT STATISTIK

1 EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024.
e. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

PENJELASAN UMUM

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

a. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
c. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu

METODOLOGI

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan.

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Tingkat Kematangan	Kriteria
(1)	(2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

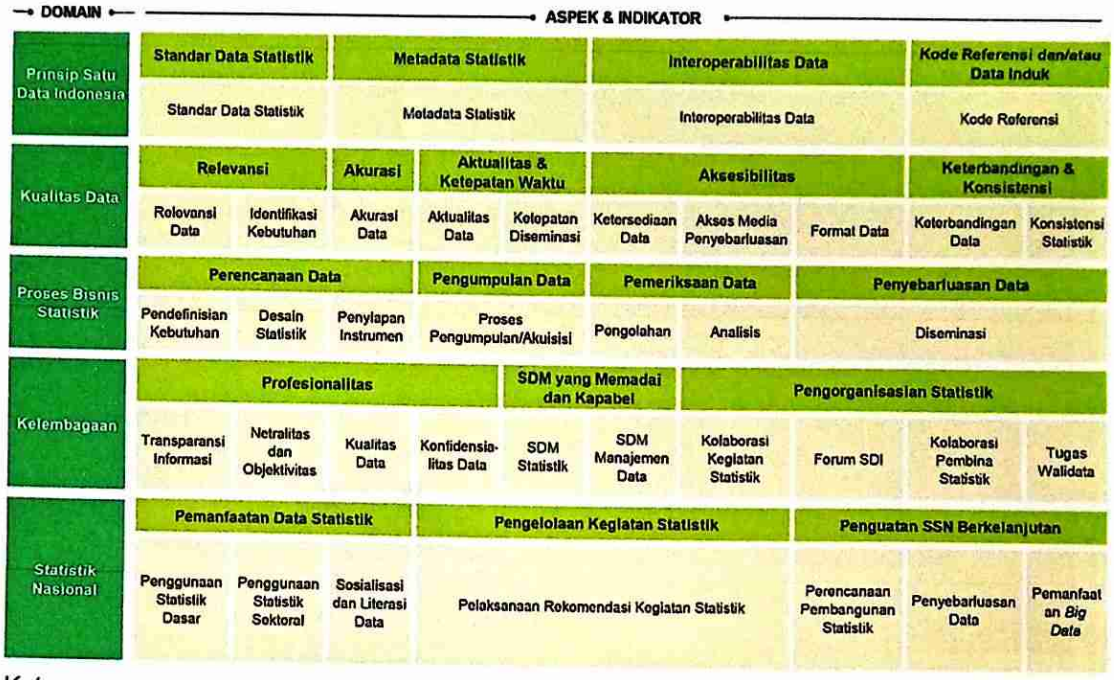
EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2
Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai	Predikat
(1)	(2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.



Keterangan:

Domain Aspek Indikator

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK NASIONAL

Tabel 3
Nilai Indeks Hasil EPSS 2023 menurut Domain dan Jenis Instansi Pemerintah

Indeks	Nasional	Jenis Instansi Pemerintah					
		Kementerian	LPNK	Instansi Lain	Pemprov	Pemkab	Pemkota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IPS	**1,78**	**2,29**	**2,51**	**1,77**	**2,01**	**1,66**	**1,88**
Domain Prinsip SDI	1,81	2,45	2,49	1,63	2,10	1,68	1,91
Domain Kualitas Data	1,70	2,22	2,51	1,84	1,87	1,57	1,80
Domain Proses Bisnis Statistik	1,82	2,31	2,74	1,84	1,99	1,69	1,83
Domain Kelembagaan	1,85	2,36	2,55	2,00	2,09	1,72	1,96
Domain Statistik Nasional	1,74	1,97	2,15	1,76	1,99	1,65	1,89

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

2 HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2023

KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Pemerintah Kota Cimahi meliputi:

a. Kompilasi Data Kesehatan Kota Cimahi
b. Survei Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga

HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	1,81	2,75
Domain Kualitas Data	24%	2,60	1,70	2,37
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	1,82	2,42
Domain Kelembagaan	17%	2,60	1,85	2,35
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	1,74	2,77
Indeks Pembangunan Statistik	**100%**	**2,60**	**1,78**	**2,53**

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Tabel 5
Nilai Indeks Aspek

Domain/Aspek	Bobot[1]	Nilai Indeks
(1)	(2)	(3)
Domain Prinsip SDI		
Standar Data Statistik	25%	3,00
Metadata Statistik	25%	3,00
Interoperabilitas Data	25%	3,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	2,00
Domain Kualitas Data		
Relevansi	21%	2,00
Akurasi	16%	3,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	1,50
Aksesibilitas	21%	3,00
Keterbandingan & Konsistensi	21%	2,50
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data	32%	2,66
Pengumpulan Data	26%	2,00
Pemeriksaan Data	21%	2,00
Penyebarluasan Data	21%	3,00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	2,50
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	2,00
Pengorganisasian Statistik	35%	2,50
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	2,33
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	3,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	3,00

Keterangan: [1] Bobot aspek pembentuk indeks domain

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

KEUNGGULAN, KEKURANGAN, DAN REKOMENDASI

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

Keunggulan:

- Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Kota Cimahi sudah berjalan dengan baik. Sudah ada kebijakan SDI yang mengatur tata kelola data di Pemerintah Kota Cimahi yang mencakup antara lain standar data, metadata dan interoperabilitas data.
- Penerapan Aspek Standar Data Statistik dan Metadata Statistik sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Walikota Cimahi Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Satu Data Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Variabel-variabel yang digunakan dan indikator-indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik di Pemerintah Kota Cimahi sudah menerapkan Standar Data Statistik Nasional. Di samping itu, kegiatan statistik tersebut juga sudah dilengkapi dengan metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku yang ditetapkan oleh pembina data statistik.
- Penerapan Aspek Interoperabilitas Data sudah dilakukan oleh seluruh produsen data terkait. Data dari seluruh kegiatan statistik telah disebarluaskan satu pintu melalui portal data yang sudah dilengkapi dengan *web service*.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Kode Referensi dan/atau Data Induk sudah dilakukan oleh produsen data, namun statistik yang dihasilkan belum seluruhnya menggunakan kode referensi kewilayahan dengan menerapkan *bridging* antara kode wilayah kerja statistik BPS dengan kode wilayah administrasi Kementerian Dalam Negeri.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kota Cimahi perlu melakukan penerapan kode referensi menggunakan kode referensi dan/atau data induk yang disepakati forum SDI.
- Pemerintah Kota Cimahi perlu membuat jadwal penilaian, reviu, dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip SDI serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

2. Domain Kualitas Data

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Aksesibilitas terkait penyediaan format data yang beragam telah dilakukan dalam bentuk *excel, csv, API* pada portal *Open* Data Kota Cimahi di Pemerintah Kota Cimahi. Demikian pula penerapan terkait ketersediaan data untuk pengguna data dan akses media penyebarluasan data telah dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data.
- Penerapan Aspek Akurasi terkait penilaian akurasi data telah dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data.

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Relevansi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, serta Keterbandingan dan Konsistensi sudah dilakukan oleh produsen data, namun menggunakan standar/pedoman yang berbeda-beda.
- Penerapan pada Aspek Aktualitas dan Ketepatan waktu terkait pemantauan ketepatan waktu diseminasi belum dilakukan oleh seluruh produsen data.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kota Cimahi perlu menyusun suatu kebijakan/kaidah baku tentang penerapan Aspek Relevansi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, serta Keterbandingan dan Konsistensi Data. Perlu dilakukan pemantauan ketepatan waktu diseminasi data/informasi data sesuai jadwal rilis dan diumumkan kepada pengguna data (perlu adanya kalender rilis data).
- Penerapan dalam Aspek Aksesibilitas dan Akurasi perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala serta ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

3. **Domain Proses Bisnis Statistik**

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Perencanaan Data berada dalam kategori Baik dan sudah ada Peraturan Walikota Cimahi yang mengatur tentang tata kelola satu data di Kota Cimahi. Aspek Perencanaan Data sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan metadata kegiatan dan metadata indikator.
- Penerapan Aspek Penyebarluasan Data berada dalam kategori Baik. Diseminasi data telah dilakukan melalui *website* Satu Data Cimahi yang dapat diakses untuk masyarakat umum dan dibagipakaikan antar instansi.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Pengumpulan Data sudah dilakukan pada kegiatan Survei Program Indonesia Sehat, namun belum terdokumentasi pada kegiatan Kompilasi Data Kesehatan. Aspek Pemeriksaan Data belum dilakukan untuk seluruh kegiatan statistik yang dilaksanakan.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kota Cimahi perlu meningkatkan implementasi proses bisnis statistik yang sudah terstandar untuk dilaksanakan di seluruh produsen data. Proses bisnis statistik yang dimaksud mencakup proses pendefinisian kebutuhan statistik, desain statistik, pengumpulan dan pengolahan data yang sesuai dengan kaidah-kaidah statistik.
- Pemerintah Kota Cimahi perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap aspek perencanaan dan penyebarluasan data yang sudah berjalan dengan baik, serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

4. Domain Kelembagaan

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait penjaminan transparasi informasi statistik dan penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data metodologi sudah dilakukan oleh seluruh produsen data berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Nomor: 069/KEP.225-Diskominfo/2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Urusan Statistik di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait kolaborasi penyelenggaraan statistik sudah dilakukan oleh seluruh produsen data. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas sebagai walidata juga sudah berjalan baik dan terkoordinasi antara walidata dan produsen data.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait penjaminan konfidensialitas data belum tergambarkan bahwa terdapat prosedur baku yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu.
- Penerapan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel terkait kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik termasuk kategori Cukup. Pemerintah Kota Cimahi telah mengupayakan pemenuhan SDM bidang statistik melalui adanya Analisis Beban Kerja (ABK) namun SDM belum terpenuhi sesuai dengan perencanaan.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kota Cimahi perlu menyusun strategi pemenuhan SDM bidang statistik, mendorong SDM dalam keikutsertaan kegiatan Diklat Statistik Sektoral, pemenuhan jumlah SDM di bidang statistik pada setiap produsen data sektoral dan penerapan standar kompetensi teknis di bidang statistik.
- Pemerintah Kota Cimahi perlu menetapkan prosedur dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu dan pengendalian data beserta hak akses sebelum data disebarluaskan.
- Pemerintah Kota Cimahi perlu melakukan reviu, evaluasi dan tindak lanjut terkait penjaminan transparasi informasi statistik, penjaminan netralitas dan obyektivitas serta kolaborasi penyelenggaraan statistik, serta penyelenggaraan pelaksanaan tugas sebagai walidata untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

5. Domain Statistik Nasional

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik di Pemerintah Kota Cimahi termasuk kategori Baik. Pemerintah Kota Cimahi mengimplementasikan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, yakni meminta rekomendasi BPS dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan survei kepada BPS sehingga kegiatan statistik telah memperoleh surat rekomendasi dari BPS.
- Penerapan Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan termasuk kategori Baik. Pemerintah Kota Cimahi telah memiliki program kerja Perencanaan

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Pembangunan Statistik yang tertuang pada dokumen Penyusunan Arsitektur Satu Data dan *Roadmap* Implementasi Satu Data Kota Cimahi yang telah diselenggarakan sejak tahun 2022. Selain itu penyebarluasan data telah melibatkan walidata yang terkoordinir dalam portal satu data dan telah memiliki SOP yang baku dalam penyebarluasan data yang berlaku bagi seluruh produsen data. Selain itu pemanfaatan *Big Data* juga sudah diimplementasikan pada web *smartcity* Kota Cimahi.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik berkategori Cukup. Pemerintah Kota Cimahi belum secara maksimal melakukan penyebarluasan dan literasi/edukasi terkait hasil statistik kepada publik melalui berbagai media. Kegiatan yang telah dilakukan baru sebatas informasi ketersediaan data dan publikasi data di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dalam Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan Tahun 2023.
- Penggunaan Data Statistik Dasar yang telah dilakukan dalam rangka Perencanaan, *Monitoring*, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan belum tergambarkan, terutama penggunaan data statistik dasar yang telah dilakukan untuk IKU kepala daerah dan/atau kegiatan Musrenbang. Kegiatan yang telah dilaksanakan baru sebatas perencanaan yang dilaksanakan pada Forum Satu Data Kota Cimahi Tahun 2022 dalam rangka pengambilan kesepakatan mengenai perencanaan data yang akan dikumpulkan pada tahun 2023.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kota Cimahi perlu mendorong produsen data dan dikoordinasikan dengan walidata untuk memaksimalkan kegiatan literasi data statistik kepada publik melalui berbagai media.
- Pemerintah Kota Cimahi perlu menetapkan daftar statistik dasar untuk kepentingan pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan BPS terkait ketersediaan dan interpretasi data-data tersebut agar penggunaannya tepat sasaran.
- Pada penerapan masing-masing Aspek Pemanfaatan Data Statistik, Pengelolaan Kegiatan Statistik, dan Penguatan SSN Berkelanjutan, perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala serta dilakukan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, *monitoring* dan evaluasi, dan penyusunan kebijakan.
- Meskipun dokumen perencanaan pembangunan statistik telah ada, tetapi perlu diperhatikan konten dokumen perencanaan tersebut mencakup kegiatan statistik apa saja yang akan dilaksanakan, pembagian perannya, batas waktu kegiatan, target yang akan dicapai, dan lain-lain. Hal ini berguna sebagai rujukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik agar lebih terarah, efektif, dan efisien.

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

3 TINGKAT KEMATANGAN PER INDIKATOR

Tabel 6
Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot[1]	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	100%	3,00
	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	100%	3,00
	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	100%	3,00
	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	100%	2,00
Kualitas Data	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data Terhadap Pengguna	60%	2,00
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	40%	2,00
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	100%	3,00
	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	50%	2,00
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	50%	1,00
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	34%	3,00
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	33%	3,00
	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	50%	3,00

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Domain	Aspek	Indikator	Bobot[1]	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	50%	2,00
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Desain Statistik	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	34%	2,00
	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	100%	2,00
	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50%	2,00
		Tingkat Kematangan Analisis Data	50%	2,00
	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	100%	3,00
Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	25%	2,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	25%	2,00
	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	50%	2,00
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	50%	2,00

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Domain	Aspek	Indikator	Bobot[1]	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	25%	2,00
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	25%	2,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata	25%	3,00
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	34%	2,00
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	33%	2,00
	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	100%	3,00
	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan *Big Data*	34%	3,00

Keterangan: [1] Bobot indikator pembentuk indeks aspek

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Responden:
Pemerintah Daerah Kota Cimahi

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Pemerintah Daerah Kota Cimahi

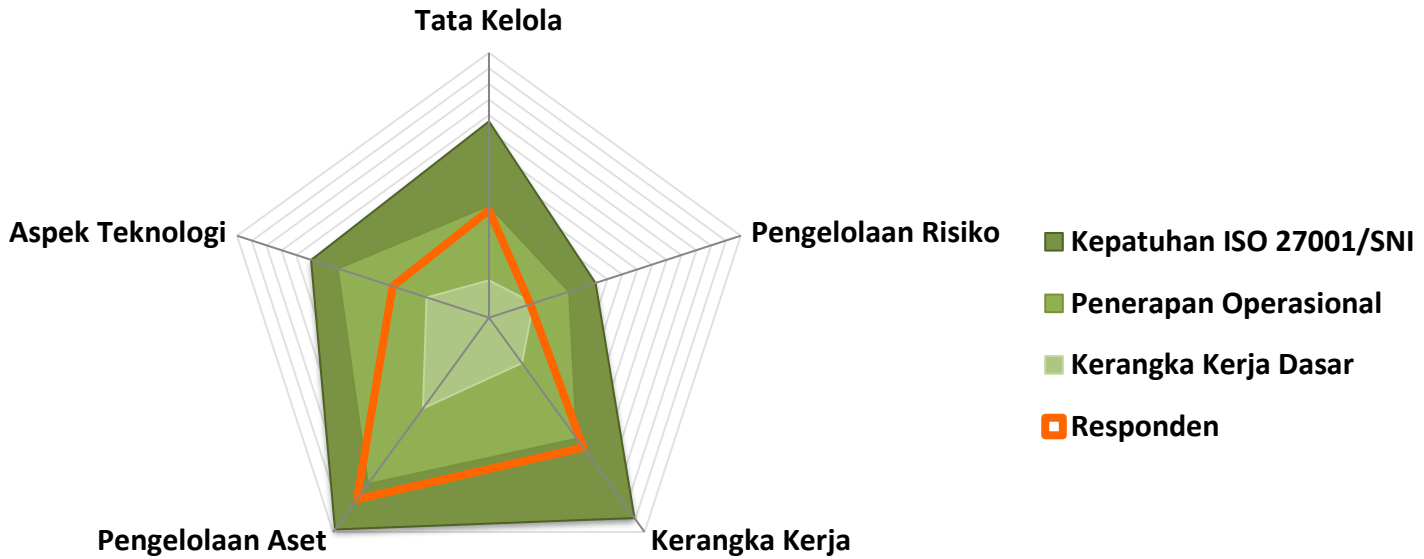
0226642733
diskominfo@cimahikota.go.id
7 September 2023

Skor Kategori SE	: 32	Kategori SE	Tinggi

Hasil Evaluasi Akhir: **Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar**

Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO27001 sesuai Kategori — 409

Tata Kelola	: 69	Tk Kematangan:	II	
Pengelolaan Risiko	: 28	Tk Kematangan:	I+	I+
Kerangka Kerja Keamanan Informasi	: 103	Tk Kematangan:	II	s/d
Pengelolaan Aset	: 144	Tk Kematangan:	III	III
Teknologi dan Keamanan Informasi	: 65	Tk Kematangan:	II	
Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga	: 49%			
Pengamanan Layanan Infrastruktur Awa	: 60%			
Perlindungan Data Pribadi	: 48%			



NILAI HASIL PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	SAKIP	20	RB	60	VIDEO	20	TOTAL	PERINGKAT	KATEGORI	PREDIKAT
1	BAPPELITBANGDA	79,84	15,968	33,1	54,71	94,79	18,96	89,64	1	A	SANGAT BAIK
2	INSPEKTORAT	83	16,6	33,45	55,29	88,54	17,71	89,60	2	A	SANGAT BAIK
3	DPMPTSP	73,03	14,606	35	57,85	80,21	16,04	88,50	3	A	SANGAT BAIK
4	DISDIK	79,43	15,886	32	52,89	80,21	16,04	84,82	4	A	SANGAT BAIK
5	BPKAD	78,99	15,798	34,78	57,49	46,88	9,38	82,66	5	A	SANGAT BAIK
6	DISDUK	78,91	15,782	34,34	56,76	46,88	9,38	81,92	6	A	SANGAT BAIK
7	SETDA	77,49	15,498	32,43	53,60	59,38	11,88	80,98	7	A	SANGAT BAIK
8	DINKES	79,03	15,806	33,04	54,61	50,00	10,00	80,42	8	A	SANGAT BAIK
9	BKPSDMD	72,71	14,542	27,4	45,29	95,83	19,17	79,00	9	BB	BAIK
10	DISKOMINFO	75,84	15,168	32,14	53,12	52,08	10,42	78,71	10	BB	BAIK
11	BAPPENDA	76,04	15,208	30,17	49,87	66,67	13,33	78,41	11	BB	BAIK
12	DPUPR	76,32	15,264	26,36	43,57	47,92	9,58	68,42	12	B	CUKUP BAIK
13	LH	73,43	14,686	26,29	43,45	40,63	8,13	66,27	13	B	CUKUP BAIK
14	KESBANG	71,12	14,224	26,36	43,57	31,77	6,35	64,15	14	B	CUKUP BAIK
15	RSUD	73,25	14,65	25,96	42,91	32,29	6,46	64,02	15	B	CUKUP BAIK
16	DP3AP2KB	79,12	15,824	20,3	33,55	50,00	10,00	59,38	16	CC	CUKUP
17	KEC. CISEL	74,58	14,916	20,61	34,07	46,35	9,27	58,25	17	CC	CUKUP
18	DINSOS	79,12	15,824	21,21	35,06	29,17	5,83	56,72	18	CC	CUKUP
19	KEC CIMTENG	72,89	14,578	24,72	40,86	0,00	0,00	55,44	19	CC	CUKUP
20	DISHUB	75,86	15,172	21,1	34,88	9,38	1,88	51,92	20	CC	CUKUP
21	DISBUDPARPORA	77,61	15,522	17,4	28,76	35,94	7,19	51,47	21	CC	CUKUP
22	BPBD	74,21	14,842	15,44	25,52	34,90	6,98	47,34	22	C	BURUK
23	SETWAN	70,26	14,052	12,03	19,88	0	0,00	33,94	23	C	BURUK
24	DISDAGKOPERIN	72,14	14,428	0	0,00	67,71	13,54	27,97	24	D	SANGAT BURUK
25	DPKP	79,98	15,996	0	0,00	47,92	9,58	25,58	25	D	SANGAT BURUK
26	DISPANGTAN	72,82	14,564	0	0,00	41,15	8,23	22,79	26	D	SANGAT BURUK
27	DISNAKER	70,52	14,104	0	0,00	36,98	7,40	21,50	27	D	SANGAT BURUK
28	DISARDA	75,84	15,168	0	0,00	3,13	0,63	15,79	28	D	SANGAT BURUK
29	SATPOL	75,12	15,024	0	0,00	0,00	0,00	15,02	29	D	SANGAT BURUK
30	KEC. CIMUT	71,09	14,218	0	0,00	0,00	0,00	14,22	30	D	SANGAT BURUK

AA
A
BB
B
CC
C
D

ISTIMEWA	**>90-100**
SANGAT BAIK	**>80-90**
BAIK	**>70-80**
CUKUP BAIK	**>60-70**
CUKUP	**>50-60**
BURUK	**>30-50**
SANGAT BURUK	**>0-30**